

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Pariwisata di Indonesia merupakan salah satu sektor yang memiliki prospek cerah dan potensi yang luar biasa untuk dikembangkan sebagai salah satu sektor penyumbang devisa negara yang besar. Hal ini didukung oleh letak geografis Indonesia dan keberagaman budayanya yang sangat luar biasa. Sehingga menjadikan Indonesia memiliki daya tarik tersendiri di mata dunia. Namun apakah dengan hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai destinasi wisata yang tersohor di dunia? rasanya tidak. Karena jika tidak dibarengi dengan keseriusan Pemerintah dalam mengatur regulasi serta kebijakan sektor Pariwisata di Indonesia sektor Pariwisata dengan segala keindahan dan keanekaragamannya hanya akan menjadi sia-sia saja. Apalagi, di negara-negara justru sedang menunjukkan keseriusannya dalam mengembangkan sektor pariwisatanya. Pengembangan sektor pariwisata ini penting mengingat sektor pariwisata dapat menyumbang devisa negara dengan jumlah yang tidak sedikit. Hal tersebutlah yang sedang dikejakan oleh negara-negara tetangga kita di kawasan ASEAN. Dan jika dibandingkan dengan negara-negara di kawasan ASEAN jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia masih terbelakang masih tertinggal. Hal tersebut dapat dilihat pada data berikut ini.

Tabel I. 1**Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Negara-Negara ASEAN (2015-2018)**

NEGARA	TAHUN			
	2015	2016	2017	2018
THAILAND	29.853.353	30.907.198	35.235.933	38.367.521
MALAYSIA	25.730.582	26.122.683	26.042.509	25.890.734
SINGAPURA	15.230.728	15.685.586	17.304.471	18.571.847
INDONESIA	9.369.142	12.023.971	14.039.142	15.816.199
VIETNAM	7.943.274	8.924.876	13.762.836	15.469.873
FILIPINA	5.357.815	5.658.252	6.544.883	7.165.892
KAMBOJA	4.773.750	4.891.291	5.533.510	6.275.271
LAOS	4.681.570	4.465.846	3.911.880	4.137.982
MYANMAR	4.672.322	3.810.472	3.380.824	3.609.380
BRUNEI	238.154	218.506	254.287	1.470.283

Sumber: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/08/19/di-asean-kunjungan-wisatawan-mancanegara-indonesia-urutan-ke-4> (diakses pada tanggal 15 September 2019 pukul 23.12 WIB)

Dari data tabel diatas, dapat dilihat bahwa jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia masih jauh tertinggal oleh negara-negara tetangga. Hal tersebut masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk dapat mengembangkan lagi sektor pariwisata di Indonesia mengingat Indonesia diuntungkan dengan letak dan kondisi geografis yang sangat baik, banyaknya pulau, pantai, gunung menjadikam keuntungan tersendiri bagi Indonesia. Akan tetapi hal tersebut belum mendukung sepenuhnya untuk menjadikan Indonesia sebagai destinasi wisata dunia bahkan di kawasan ASEAN. Untuk itu diperlukan strategi-strategi baru dan kebijakan-kebijakan yang lebih baik lagi dari Pemerintah agar dapat menggenjot sektor pariwisata agar dapat menjadi tujuan wisata dunia. Karena target pemerintah di tahun 2019 adalah menjadikan sektor pariwisata menjadi penyumbang terbesar devisa negara dibandingkan sektor-sektor lain.

Sektor pariwisata merupakan andalan bagi banyak negara untuk memperoleh pemasukan devisa negara yang cukup besar, terutama negara-negara yang memiliki kondisi geografis dan bentang alam yang indah. Tak hanya itu

negara-negara yang tidak memiliki banyak sumber daya alam untuk dieksploitasi banyak mengandalkan pemasukan negara melalui sektor pariwisata mereka. Dengan semakin tumbuh pesatnya sektor pariwisata suatu negara maka otomatis ikut turut memberikan dampak sosial ekonomi serta mensejahterkan masyarakat di sekitar objek wisata tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh Leiper dalam Pitana dan Diarta (2009:185-193):

Dampak positif dari pembangunan pariwisata adalah pendapatan dari penukaran valuta asing, menyehatkan neraca perdagangan luar negeri, pendapatan dari usaha atau bisnis pariwisata, pendapatan pemerintah dari sektor pajak, penyerapan tenaga kerja, multiplier effects, pemanfaatan fasilitas pariwisata oleh masyarakat. Namun pengembangan pariwisata juga mempunyai dampak yang negatif antara lain ketergantungan terlalu besar pada pariwisata, meningkatnya angka inflasi dan meroketnya harga tanah, meningkatnya kecenderungan untuk mengimpor bahan-bahan yang diperlukan dalam pariwisata sehingga produk-produk lokal tidak terserap, sifat pariwisata yang musiman, tidak dapat diprediksi dengan tepat, menyebabkan pengembalian modal investasi juga tidak pasti waktunya, timbulnya biaya-biaya tambahan lain bagi perekonomian setempat.

Semakin baiknya sarana dan prasarana, infrastruktur yang semakin terkoneksi dengan baik antar daerah, sistem transportasi massal yang semakin mudah adalah sebagian kecil contoh bagaimana pariwisata di Indonesia sangat berkembang dan menjadi salah satu pilihan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dan juga semakin banyak terbuka lapangan pekerjaan dari sektor pariwisata ini. Peranan otonomi daerah juga sangat penting dalam perkembangan pariwisata yang ada di Indonesia.

Berikut ini tabel yang menunjukkan peningkatan jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia

Tabel I. 2

**Perkembangan Wisatawan Mancanegara Yang Berkunjung ke Indonesia
2015-2018**

Tahun	Jumlah Wisatawan Mancanegara
2015	9.369.142
2016 (%)	12.023.971 (22,08)
2017 (%)	14.039.790 (14,36)
2018 (%)	15.816.199 (11,23)

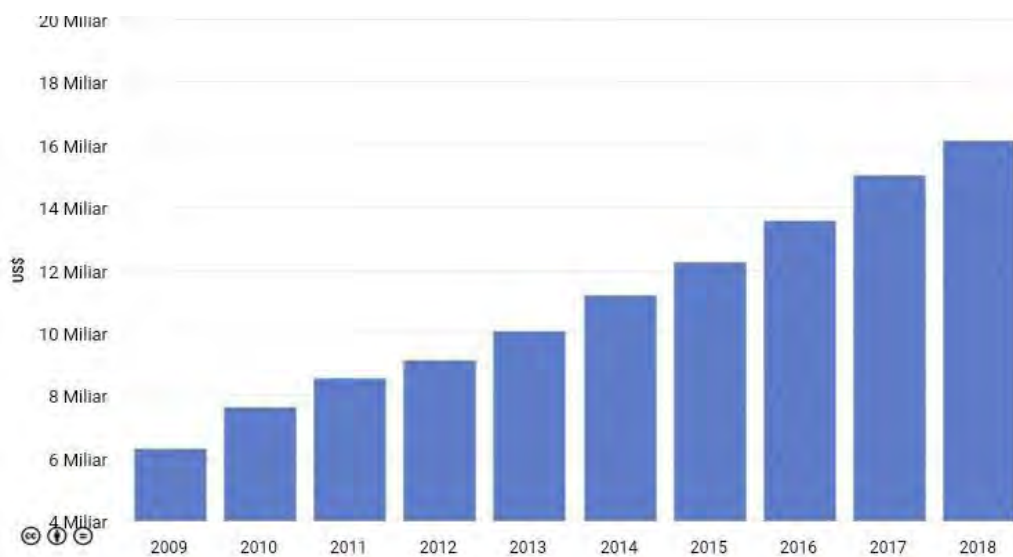
Sumber: <http://www.kemenpar.go.id/categories/statistik-wisatawan-mancanegara> (diakses pada tanggal 15 September 23.53 WIB). (diolah)

Berdasarkan dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa perkembangan pariwisata di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup baik dari tahun ke tahun. Walaupun tidak terlalu signifikan tapi pertumbuhan tersebut terus stabil dari tahun ke tahun. Perkembangan pariwisata di Indonesia tidak luput dari semakin baiknya infrastruktur yang ada sehingga memudahkan akses ke berbagai tempat. Dan juga semakin keterbukaan otonomi daerah yang ada juga menjadi salah satu faktor penting bagi perkembangan pariwisata di Indonesia.

Melihat perkembangan wisatawan yang begitu signifikan dari tahun ke tahun, diharapkan pemerintah dapat mempertahankan atau bahkan dapat lebih memaksimalkan lagi semua potensi sumber daya yang ada sehingga perkembangan pariwisata Indonesia dapat berkembang dengan maksimal. Dan juga hal tersebut dapat meningkatkan pendapatan daerah dan pendapatan devisa negara. Serta dapat pula mendorong ekonomi masyarakat dan mendorong memperluas pembukaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Dan dapat pula mempromosikan bagaimana keindahan alam Indonesia ke seluruh dunia.

Kontribusi sektor pariwisata Indonesia terhadap penerimaan devisa negara terbilang cukup besar. Hal ini bisa dilihat dari data Kementerian Pariwisata, pertumbuhan devisa dari sektor pariwisata Indonesia mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Hal tersebut dapat dilihat dari grafik pada gambar berikut ini.

Gambar I.1
Grafik Pertumbuhan Devisa dari Sektor Pariwisata Indonesia
Tahun 2009-2018



Sumber: www.databoks.katadata.co.id (Diakses pada tanggal 16 September 2019 pukul 15.40 WIB).

Berdasarkan dari data grafik diatas, pertumbuhan devisa dari sektor Pariwisata mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, hal tersebut tentu merupakan hal sangat positif bagi pemasukan pendapatan negara. Pada tahun 2018 penerimaan devisa dari sektor pariwisata sebesar USD 17 miliar menjadikan sektor pariwisata berada di urutan kedua sebagai penyumbang devisa terbesar Indonesia dibawah industri kelapa sawit. Dan di tahun 2019 pemerintah menargetkan kunjungan wisatawan mancanegara adalah 20 juta orang dengan target devisa dari sektor pariwisata sebesar USD 20 miliar (www.nasional.kontan.id diakses pada tanggal 16 September 2019 pukul 16.26 WIB).

Pengelolaan pariwisata haruslah mengacu pada prinsip-prinsip pengelolaan yang menekankan pada nilai-nilai kelestarian lingkungan, komunitas lokal, dan nilai-nilai sosial daerah tersebut sehingga wisatawan menikmati kegiatan wisatanya serta bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat sekitar daerah pariwisata. Dan juga masyarakat harus berperan aktif dalam menjaga dan melestarikan lingkungan tempat wisata.

Pembangunan merupakan suatu upaya perubahan dalam segala aspek kehidupan yang direncanakan secara sistematis dan bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Konsep pembangunan telah mengalami perkembangan signifikan sejak akhir Perang Dunia II. Pembangunan sering diartikan dengan pertumbuhan ekonomi, sehingga tujuan awalnya adalah untuk meningkatkan PDB. Namun bersamaan dengan perubahan konsep pembangunan, tujuan pembangunan semakin meluas dan mempertimbangkan berbagai aspek.

Konsep pembangunan dari waktu ke waktu terus mengalami perkembangan berdasarkan kondisi yang ada. Berikut ini akan dijelaskan perkembangan konsep pembangunan yang berfokus pada konteks politik, tujuan pembangunan, dan pendekatan dominan.

Tabel I.3
Perkembangan Konsep Pembangunan

Tahun	Konteks	Tujuan	Pendekatan
1940-an	Akhir perang dunia II	Mempromosikan perdamaian, hak asasi manusia, stabilisasi moneter dan pembangunan.	Berinvestasi pada rebuilding government, keamanan, rekonstruksi, dan swasembada
1950-an	Dekolonialisasi pasca perang; fokus pada perdagangan	Peningkatan PDB	Investasi dalam bidang pemerintahan dan infrastruktur, mempromosikan skala ekonomi dan dorongan besar pertumbuhan yang seimbang.
1960-an	Pendirian OECD (Organization for Economic	...dan lapangan pekerjaan, keseimbangan	Dualisme ekonomi, harga kebijakan, pertumbuhan yang

	Cooperation and Devekopment) pada tahun 1960; IDA (International Development Assosiation) pada tahun 1960 dan UNDP (United Nation Development Programme) pada tahun 1966.	perjnjian BOP, dan hak asasi manusia.	seimbang antara pertanian dan industri, promosi ekspor, investasi dalam pertanian dan sumber daya manusia, kesadaran adanya dampak lingkungan.
1970-an	Dialog NIEO (New International Ecnomic Order) dan utara-selatan; pembentukan UNEP (United Nations Environmental Programme) pada tahun 1972	...dan PDB perkapita dan indikator pembangunan manusia (HDI)	Berinvestasi pada sektor informal, teknologi tepat guna, distribusi pendapatan, kewirausahaan lain, teori ketergantungan, perlu untuk mengorganisir respon terhadap dampak lingkungan pembangunan.
1980-an	Negara berkembang mengalami krisis hutang; disinvestasi di sektor publik, promosi ekspor, devaluasi mata uang.	...dan stabilitas ekonomi makro dan disiplin fiska; hak untuk pembangunan, promosi pembangunan berkelanjutan.	Peryumbuhan endogen; berinvestasi pada liberalisasi, privatisasi; peran pasar ditingkatkan, berinvestasi pada kebutuhan dasar. Investasi asing; pembangunan berkelanjutan.
1990-an	Jatuhnya tembok berlin; akhir komunisme; pengakuan atas krisis lingkungan.	...dan meningkatkan pembangunan manusi, hak, kemampuan, mata pencaharian, dan meningkatkan kebebasan; mengadopsi pembangunan berkelanjutan.	Meningkatkan isu sosial dan modal manusia, gender dan pemberdayaan; mengurangi korupsi; mempromosikan good governance dan stakeholders participation; pertumbuhan agenda neo-liberal dan greening of policy.
2000-an	Adopsi MDGs (Millenium Development Goals); konferensi Monterr;	...mempromosikan pembangunan berkelanjutan; resiko dan kelemahan	Mempromosikan pembangunan ekonomi lingkungan sosial; konteks khusus

	deklarasi Paris; konsensus Uni Eropa; krisis keuangan.	kesinambungan	pembangunan.
2010-an	Tumbuhnya kesenjangan antar negara; krisis keuangan; pengangguran; krisis lingkungan; PBB mencanangkan kebijakan menuju pembangunan berkelanjutan	...mempromosikan pembangunan berkelanjutan; risiko dan kelemahan kesinambungan; mempromosikan pembangunan inklusif	Kembali ke pertumbuhan dan teori pekerja; green economy dan peryumbuhan inklusif, teori-teori kejayaan, ekonomi, dan pembangunan

Sumber: Gupta et al. (2015:543)

Konsep paling terbaru dari pembangunan adalah pembangunan inklusif. Perkembangan konsep pembangunan diatas menjadi akar munculnya pembangunan inklusif. Pembangunan inklusif merupakan implikasi dari pengalaman pembangunan dunia yang kemudian menjadi masukan munculnya pembangunan inklusif.

Istilah pembangunan inklusif sering disampaikan oleh pimpinan negara dalam berbagai kesempatan pidato. Pembangunan inklusif secara umum diartikan sebagai oposit dari pembangunan eksklusif, yaitu pembangunan yang hanya menguntungkan kelompok eksklusif tertentu saja. Kesadaran mengenai pentingnya pembangunan inklusif timbul setelah melihat realitas bahwa pembangunan nasional yang telah menghasilkan pertumbuhan ekonomi (growth) yang cukup tinggi tidak sepenuhnya dinikmati oleh kelompok miskin di pedesaan atau di daerah kumuh perkotaan. Meskipun ekonomi tumbuh pesat, namun jumlah masyarakat di bawah garis kemiskinan tidak banyak berkurang.

Dalam RPJMN 2010-2014 Buku I Bab V Kerangka Ekonomi Makro, pemerintah secara eksplisit menyebutkan pentingnya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Dijelaskan bahwa pembangunan ekonomi yang eksklusif menyertakan semua kelompok masyarakat dan golongan serta masyarakat yang berada di wilayah-wilayah yang terpencil dan terisolasi. Pembangunan yang inklusif dan berkeadilan juga dicerminkan dari segi proses perumusan kebijakan dan implementasinya, yaitu harus melibatkan para pemangku kepentingan untuk dapat berperan aktif dan bekerjasama dengan membangunkonsensus pemihakan kepada masyarakat yang masih tertinggal.

Kebijakan yang afirmatif harus dijalankan untuk mengatasi kesenjangan, ketertinggalan, maupun kemiskinan yang masih mewarnai kehidupan sebagian besar bangsa Indonesia.

Selama ini beberapa negara di dunia bahkan termasuk Indonesia masih menggunakan pendekatan pembangunan eksklusif untuk meningkatkan perekonomian negara. Model pembangunan eksklusif hanya terkonsentrasi dan menguntungkan sebagian kecil kelompok tertentu. Benar memang pembangunan dengan rupa tersebut mampu menghasilkan pertumbuhan tinggi, tetapi sesungguhnya tidak pernah menetes ke bawah dan dinikmati kelompok miskin. Model pembangunan eksklusif tidak mampu mengajak seluruh lapisan masyarakat melakukan mobilitas vertikal untuk berbagi menikmati manfaat pembangunan itu sendiri. Sederetan data dan angka statistik baik dari pemerintah dan juga lembaga-lembaga non pemerintah akan angka-angka ketimpangan, kemiskinan, dan pengangguran tampaknya sudah cukup membuktikan akan kelemahan model pembangunan eksklusif yang selama ini masih mewarnai setiap kebijakan yang diambil. Pembangunan eksklusif juga diterapkan di sektor pariwisata, akan tetapi tidak semua pihak setuju akan pariwisata eksklusif.

Banyak pihak yang memberikan kritik untuk pariwisata eksklusif karena dianggap tidak memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk mengakses pariwisata dan menikmati manfaatnya. Hanya orang-orang tertentu yang dapat mengakses pariwisata tersebut yang artinya akan terseleksi dengan sendirinya orang-orang yang dapat menikmati pariwisata itu sendiri.

Untuk itu pembangunan inklusif juga harus diterapkan dalam sektor pariwisata. Banyak pihak yang lebih memilih agar pariwisata di Indonesia bersifat inklusif. Berikut ini kenapa pariwisata inklusif lebih baik dibandingkan pariwisata eksklusif.

1. Pariwisata adalah hak siapa saja.

Pariwisata inklusif secara sembarang sering disederhanakan menjadi wisata murah. (Pariwisata inklusif yang dibahas akan dibatasi pada pertumbuhan ekonomi, kondisi lingkungan, dan kehidupan sosial masyarakat—mengecualikan pembahasan pariwisata untuk disabilitas.) Tulisan "*Sustainable Tourism, Justice and An Ethic of Care: Toward the Just Destination*" menjelaskan, masyarakat

lokal didukung untuk berkembang, tidak hanya pemilik modal besar, dengan pemberian kesempatan dan akses memulai usaha pariwisata (Jamal & Camargo, 2014). Mereka pun bisa menawarkan produk dan jasa pariwisata dengan harga murah—akibat “persaingan sempurna” dalam penjualan produk dan jasa yang relatif sama. Alhasil, pariwisata inklusif mendatangkan wisatawan dalam jumlah besar.

Pariwisata pun dianggap sebagai hak bagi siapa saja, bukan hanya bisa dinikmati orang kaya dan memarginalisasi orang-orang yang tak memiliki akses. Semua pelaku wisata memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keuntungan dan pengalaman dari pariwisata.

Berangkat dari pemahaman itu, pihak-pihak yang mendukung pariwisata inklusif mengkritik pariwisata eksklusif. Menurut mereka, akses dan kesempatan mencari keuntungan dari aktivitas pariwisata hanya diberikan pada pemilik modal besar, sementara masyarakat lokal dinomorduakan. Akibatnya, tidak semua wisatawan bisa menikmati pariwisata ini karena terhalang harga yang mahal. Ketika pariwisata tidak bisa menjadi hak semua orang, maka ada sesuatu yang “salah” di situ. Pemilik modal tentu menjadi pendosa paling besar sebab menekan kesempatan masyarakat lokal untuk berkembang, yang kemudian berimbas pada harga pariwisata yang mahal dan tingkat partisipasi wisatawan yang rendah. Persoalan klasik, bukan?

2. Pariwisata untuk kualitas daripada kuantitas

Pariwisata eksklusif hadir dengan penawaran sebaliknya. Produk dan jasa pariwisata dijual dengan pelayanan tinggi berharga mahal sehingga wisatawan yang berkunjung pun terseleksi, yakni hanya mereka yang memiliki uang dan mau menggunakannya. Kuantitas tak menjadi masalah; sama saja bohong jika jumlah wisatawan yang besar tidak diimbangi dengan kualitas penggunaan uangnya.

Dengan pemahaman itu, Swarbrooke mencoba melawan mereka yang sinis terhadap pariwisata eksklusif dalam buku *The Meaning of Luxury in Tourism* (2018). Jumlah wisatawan yang lebih sedikit akan meminimalisasi terjadinya perusakan alam karena pola pikir mereka cenderung lebih mudah diubah untuk menjaga kelestarian alam. Bahkan, banyak di antara para wisatawan itu telah memiliki “segalanya” dalam kehidupan sehari-hari sehingga mereka siap

menyatu dengan alam dalam pelesirannya, seperti melepaskan penggunaan gawai, listrik, dan karbon. Akhirnya, pariwisata eksklusif mampu menciptakan keberlangsungan dalam jangka panjang.

Keberlangsungan tersebut, menurut pihak-pihak yang setuju dengan pariwisata eksklusif, tidak menjadi kepedulian pariwisata inklusif. Keterbukaan bagi masyarakat lokal untuk menawarkan produk dan jasa pariwisata lama-kelamaan akan membunuh mereka sendiri. Mereka beradu harga hingga menjadi terlalu murah tetapi kualitasnya serampangan. Padahal, wisatawan menginginkan kualitas terbaik dengan harga termurah. Oleh sebab itu, di Bali, misalnya, banyak penyedia pariwisata mengeluhkan soal sulitnya mencari keuntungan yang “pantas” akibat persaingan yang terlalu “sempurna”. Sementara, dalam pariwisata eksklusif, masyarakat lokal justru akan meningkatkan kualitasnya. Mereka terpacu untuk bekerja di penyedia pariwisata yang sudah ada, lalu didorong untuk memiliki pendidikan dan kemampuan yang lebih tinggi agar bisa melayani wisatawan dengan baik.

Menurut Korten dalam Warsilah (2015), pendekatan yang terlalu berorientasi kepada pertumbuhan telah menghasilkan eksklusi sosial dan tiga krisis besar, berupa : kekerasan, kemiskinan, dan kehancuran lingkungan. Kondisi ini telah menyadarkan Indonesia bahwa pembangunan di negara ini membutuhkan suatu paradigma dan pendekatan yang baru agar hal-hal terburuk tidak terjadi. Pembangunan yang tidak bertumpu pada pertumbuhan ekonomi saja namun juga memperhatikan pada aspek pertumbuhan sosial. Pendekatan pembangunan yang demikian tersebut biasanya disebut dengan pembangunan inklusif. Tujuan dari pembangunan inklusif ini adalah manfaat dari pembangunan dapat dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat dengan kata lain pembangunan yang dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat.

Pembangunan sebagai sebuah proses multidimensional yang mencakup perubahan-perubahan struktur sosial, sikap masyarakat, lembaga-lembaga nasional, sekaligus pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan, dan pembebrantasan kemiskinan (Todaro, 2000:21). Pembangunan yang sekarang ini banyak dilakukan negara-negara di dunia adalah pembangunan inklusif. Tujuan pembangunan inklusif merupakan pembangunan yang mana pembangunan harus

dapat dirasakan oleh semua masyarakat manfaatnya secara adil dan merata tanpa ada diskriminasi.

Pembangunan inklusif mendorong semua kelompok masyarakat untuk berkontribusi dalam menciptakan peluang, manfaat, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan termasuk kelompok yang memiliki keterbatasan akses terhadap pembangunan. Masyarakat yang inklusif harus dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan. Pembangunan inklusif pun menjadi agenda utama dari pembangunan pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Menurut dari *World Economic Forum* dalam laporannya yang berjudul *The Inclusive Growth and Development Report 2018*, Indonesia berada di peringkat ke-36 dari 74 negara ekonomi berkembang. Dengan *Inclusive Development Index* (IDI) score 3,95, yang mana peringkat tersebut turun dari tahun 2017 di peringkat ke-22 dari 79 negara dengan IDI score 4,29. Indonesia berada di bawah Malaysia 4,30 berada di peringkat ke-13, Thailand peringkat ke-17 dengan IDI score 4,24, dan Vietnam yang berada di peringkat ke-33 dengan IDI score 3,98. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah agar pembangunan inklusif yang diharapkan bisa tercapai dan manfaatnya dapat dirasakan oleh semua masyarakat.

Pembangunan inklusif perlu diterapkan di berbagai sektor salah satunya pariwisata. Pembangunan sektor pariwisata di Indonesia saat ini menggunakan pendekatan pembangunan kepariwisataan inklusif. Hal itu tertuang dalam Pembangunan Pariwisata 2015-2019 oleh Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Adapun sasaran dari pembangunan inklusif ini adalah meningkatnya usaha lokal dalam industri pariwisata dan meningkatnya jumlah tenaga kerja lokal yang tersertifikasi. Dengan pembangunan pariwisata inklusif ini diharapkan mampu mengurangi kemiskinan dan diskriminasi gender dalam proses pembangunan sektor pariwisata.

Salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki daerah wisata yang indah adalah Jawa Timur. Dengan beragamnya wisata di Jawa Timur, Jawa Timur dinilai mampu memaksimalkan potensi wisata yang ada, hal tersebut dapat dilihat dari data wisatawan yang mengunjungi Jawa Timur pada tabel berikut :

Tabel I.4

Perkembangan Kunjungan Wisatawan di Jawa Timur Tahun 2015-2018

Tahun	Wisatawan Mancanegara	Wisatawan Nusantara
2015	612.412	51.466.969
2016 (%)	618.536 (1,00)	54.565.006 (5,68)
2017 (%)	625.729 (1,15)	58.649.178 (6,96)
2018 (%)	830.968 (24,70)	70.217.182 (16,47)

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur (diolah)

Dapat dilihat dari tabel diatas, perkembangan pariwisata di Jawa Timur terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Wisata alam masih mendominasi untuk dikunjungi oleh wisatawan, Bromo merupakan salah satu ikon wisata Jawa Timur yang sudah mendunia, dan tentunya daerah-daerah lainnya di Jawa Timur yang tak kalah indah kasawasan wisatanya dan dapat menarik wisatawan untuk berkunjung ke Jawa Timur.

Salah satu daerah di Jawa Timur yang mulai diperhitungkan dalam sektor pariwisatanya adalah Kabupaten Gresik. Gresik sering di kenal dengan sebutan kota wali, hal itu tidak terlepas dari keberadaan makam para wali yang berada di Kabupaten Gresik yaitu, Sunan Giri dan Syekh Maulana Malik Ibrahim. Dengan keberadaan makam wali tersebut telah menjadikan Kabupaten Gresik tujuan destinasi wisata religi yang sangat populer di Jawa Timur dan Nasional. Bahkan ada juga wisatawan asing yang berkunjung ke makam wali yang ada di Kabupaten Gresik. Selain itu Gresik juga dikenal dengan sebutan kota santri, karena keberadaan pondok-pondok pesantren dan sekolah yang bernuansa islami, yaitu madrasah ibtida'iyah, tsanawiyah, dan aliyah hingga perguruan tinggi yang cukup banyak di kota ini. Dan juga yang tak kalah menarik dari Kabupaten Gresik

adalah wisata alam memiliki keindahan yang tak kalah dari daerah lain di Jawa Timur.

Dengan munculnya banyak objek-objek wisata baru di Kabupaten Gresik, membuat Kabupaten Gresik serius dalam pengembangan wilayah pariwisata yang ada. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 – 2025. Keseriusan dalam pengelolaan pariwisata tersebut membuat Kabupaten Gresik menerima penghargaan berskala nasional yaitu Indonesia Attractiveness Index (IAI) Award Tahun 2017. Pengukuran Indonesia Attractiveness Index (IAI) didasarkan pada 4 dimensi yaitu Investasi, Infrastruktur, Pariwisata, dan Pelayanan Publik (www.beritajatim.com diakses pada tanggal 17 September 2019 pukul 03.20). Dengan diperolehnya penghargaan tersebut perkembangan pembangunan pariwisata di Kabupaten Gresik telah mengalami perkembangan yang sangat baik.

Dalam perkembangannya, pembangunan pariwisata di Kabupaten Gresik telah membuahkan hasil yang memuaskan, hal tersebut dapat dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan yang berwisata ke Kabupaten Gresik.

Tabel I.5

Perkembangan Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Domestik di Kabupaten Gresik Tahun 2014 – 2018

Tahun	Wisatawan Mancanegara	Wisatawan Domestik
2014	2.877	3.170.317
2015 (%)	3.436 (16,27)	3.185.625 (0,49)
2016 (%)	4.874 (29,50)	3.258.126 (2,23)
2017 (%)	9.736 (49,93)	3.537.997 (7,91)
2018 (%)	14.625 (33,42)	3.553.920 (0,45)

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gresik (diolah)

Berdasarkan data dari tabel diatas, jumlah wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan. Walaupun wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Gresik masih sangat didominasi oleh wisatawan domestik. Sebagian besar wisatawan domestik yang berkunjung ke Kabupaten Gresik merupakan pengunjung tempat wisata religi yang sangat terkenal di Kabupaten Gresik. Makam Maulana Malik Ibrahim dan Makam Sunan Giri merupakan dua tempat wisata religi yang sangat terkenal di Kabupaten Gresik dan para wisatawan mengunjungi tempat tersebut sebagai tempat untuk berwisata religi dan juga untuk mengetahui tempat bersejarah dan untuk mengetahui sejarah tempat tersebut karena dua tempat tersebut merupakan bagian dari sejarah Wali Songo yang sangat terkenal bagi umat Islam Di Nusantara.. Sedangkan dari jumlah tersebut diatas, sebagian besar wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kabupaten Gresik merupakan wisatawan yang mengunjungi Pulau Bawean. Pulau Bawean menjadi tujuan utama para wisatawan mancanegara saat mereka berkunjung ke Kabupaten Gresik. Karena wisatawan akan disuguhkan oleh pemandangan alam yang sangat indah. Hamparan pantai dengan pasir putih yang indah, gugusan terumbu karang yang sangat menyejukkan mata merupakan sedikit gambaran bagaimana indahnya Pulau Bawean ini dan karena keindahan alamnya itulah alasan saya tertarik untuk meneliti Pulau Bawean.

Salah satu objek wisata yang dalam beberapa tahun terakhir mempunyai perkembangan yang cukup signifikan adalah Pulau Bawean. Pulau yang sering disebut sebagai Pulau Puteri oleh wisatawan ini memang memiliki keindahan alam yang tak perlu diragukan lagi. Pemerintah Kabupaten Gresik serius dalam pengembangan wisata di Pulau Bawean. Dengan mempermudah akses transportasi ke Pulau Bawean agar mempermudah wisatawan yang hendak menuju ke Pulau Bawean. Pembukaan bandara Harun Thohir pada tahun 2016 membuat transportasi ke Pulau Bawean dapat diakses melalui jalur udara yang selama ini untuk akses ke Pulau Bawean hanya bisa diakses melalui jalur laut.

Pemerintah Kabupaten Gresik juga sangat gencar melakukan promosi guna memperkenalkan Pulau Bawean sebagai destinasi wisata yang sangat diunggulkan di Kabupaten Gresik ke dunia internasional. Salah satu upaya pemerintah Kabupaten Gresik dalam mempromosikan adalah dengan menggelar Festival Budaya Pesona Islami 2017 (www.radarsurabaya.jawapos.com diakses pada tanggal 17 September 2019 pukul 03.49) yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gresik dan bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Jawa Timur.

Keindahan alam yang dimiliki Pulau Bawean memang tidak perlu diragukan lagi. Hamparan pasir putih, biru dan jernihnya air laut, ekosistem terumbu karang yang indah membuat Pulau Bawean terpilih menjadi tempat diselenggarakannya event internasional yaitu Wonderful Sail to Indonesia in Bawean pada tahun 2018. Event tersebut berlangsung dari tanggal 2-5 Oktober 2018 dengan peserta dari berbagai macam negara datang ke Pulau Bawean (www.beritagresik.com diakses pada tanggal 17 September 2019 pukul 03.59). dan pada tahun 2019 ini Pulau Bawean kembali dipercaya menjadi tuan rumah event Sail to Indonesia (www.jpnn.com diakses pada tanggal 17 September 2019 pukul 04.02). Dengan kepercayaan untuk menggelar even internasional secara dua tahun berturut-turut Pulau Bawean telah mendapat pengakuan dari dunia internasional yang mana itu membawa dampak yang sangat amat positif bagi perkembangan wisata di Kabupaten Gresik khususnya wisata di Pulau Bawean.

Dengan upaya untuk mempromosikan wisata Pulau Bawean yang begitu gencar, nampaknya membuahkan hasil yang cukup baik. hal tersebut dapat dilihat dari jumlah wisatawan yang berkunjung ke Pulau Bawean dari tahun ke tahun dari tabel berikut.

Tabel I.6
Perkembangan Wisatawan yang Berkunjung Ke Pulau Bawean
Tahun 2014-2017

Tahun	Wisatawan Mancanegara	Wisatawan Nusantara
2014	2.480	69.959
2015 (%)	3.040 (18,42)	54.661 (-27,32)
2016 (%)	4.106 (25,96)	79.792 (31,50)
2017 (%)	9.267 (55,69)	133.180 (40,09)

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gresik.(diolah)

Peningkatan yang baik dari jumlah wisatawan yang berkunjung ke Pulau Bawean membawa angin segar bagi perkembangan pembangunan pariwisata Kabupaten Gresik. Keberhasilan pembangunan pariwisata di Pulau Bawean tidak terlepas dari ikut sertanya masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar mulai mempersiapkan diri dengan untuk memperbaiki perekonomian mereka. Salah satu caranya adalah dengan mendirikan penginapan bagi wisatawan yang berkunjung. Karena tidaklah cukup mengeksplere keindahan Pulau Bawean hanya dengan sehari saja.

Disisi lain perkembangan jumlah wisatawan yang setiap tahunnya terus meningkat juga menjadi alasan masyarakat sekitar mulai membuka usaha penginapan, karena mereka sadar bahwa pentingnya sarana prasana serta fasilitas yang baik di tempat wisata sehingga dapat membuat nyaman para wisatawan. Disamping itu juga memperbaiki kehidupan ekonomi masarakat sekitar. Jumlah penginapan dari tahun ke tahun dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel I.7
Jumlah Penginapan dan Jumlah Kamar yang Ada Di Pulau Bawean Tahun
2015-2018

Tahun	Jumlah Penginapan	Jumlah Kamar
2015	8	76
2016 (%)	10 (20%)	101 (24,75%)
2017 (%)	13 (23%)	129 (21,70%)
2018 (%)	15 (13,33%)	137 (5,83%)

Sumber: www.gresikkab.bps.go.id (diakses pada tanggal 17 September 2019 pukul 04.32) (diolah)

Jumlah yang masih terbilang kecil untuk memenuhi kebutuhan wisatawan yang hendak menginap di Pulau Bawean. Akan tetapi dengan peningkatan dari tahun ke tahun merupakan hal positif bagi perkembangan perekonomian masyarakat sekitar di Pulau Bawean dan perkembangan pembangunan pariwisata di Kabupaten Gresik.

Pembangunan pariwisata inklusif memang sangat diperlukan. Apalagi untuk Negara Berkembang seperti Indonesia ini yang sedang berusaha memperbaiki kesejahteraan masyarakatnya agar dapat bersaing dengan negara-negara maju. Pembangunan inklusif sangat diperlukan karena dapat membuka akses bagi masyarakat yang tidak dapat merasakan dampak secara langsung dari pembangunan. Keterlibatan masyarakat secara langsung dalam proses pembangunan dapat membawa dampak yang positif baik dari segi sosial maupun budaya. Untuk hal tersebut maka peran pemerintah sangat di butuhkan guna membantu perkembangan pariwisata di Kabupaten Gresik khususnya pariwisata di Pulau Bawean dan membantu perekonomian masyarakat sekitar tempat wisata.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah Bagaimana pengembangan pariwisata di Pulau Bawean di lihat dari pembangunan pariwisata inklusif?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Pengembangan Pariwisata inklusif di Pulau Bawean
2. Pengembangan pariwisata di Pulau Bawean bersidat inklusif atau tidak.

I.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini terdiri dari manfaat akademik dan manfaat praktis. Manfaat akademik dalam penelitian ini dikaitkan dengan studi terdahulu untuk menemukan kesenjangan penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Berikut akan dijelaskan manfaat akademik dan manfaat praktis dalam penelitian ini.

I.4.1 Manfaat Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjawab rumusan masalah yang ada pada penelitian ini yaitu pengembangan pariwisata di Pulau Bawean dilihat dari Pembangunan Inklusif dan pembangunan pariwisata di Pulau Bawean sudah bersifat inklusif atau tidak. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai perbandingan dalam penelitian dan pengembangan lebih lanjut dalam penerapan ilmu, khususnya Ilmu Administrasi Negara dalam hal pembangunan inklusif.

Terdapat tiga studi terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini. Studi terdahulu yang pertama yaitu Jurnal penelitian yang ditulis oleh Henny Wasilah dari Pusat Penelitian Kemasyarakatan LIPI yang berjudul –Pembangunan Inklusif Sebagai Upaya Mereduksi Eksklusi Sosial Perkotaan: Kasus Kelompok Marjinal Di Kampung Semanggi, Solo, Jawa Tengah. Latar belakang penelitian ini adalah paradigma pembangunan hanya berorientasi pada pembangunan ekonomi saja dengan output pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut menghasilkan

suatu kondisi kemiskinan, deprivasi, dan eksklusi sosial. Eksklusi sosial merupakan suatu kondisi individu, keluarga, dan kelompok dalam populasi yang tidak memiliki akses sosial politik kepada sumber daya sosial, kurang berpartisipasi dalam kegiatan, sehingga memiliki kondisi hidup dan fasilitas yang kurang memadai.

Saran yang diberikan oleh Henny Wasilah dalam penelitian tersebut adalah mengubah orientasi pembangunan tidak hanya untuk pertumbuhan ekonomi tetapi juga mementingkan aspek sosial masyarakat. Memberikan akses pembangunan kepada masyarakat sehingga masyarakat turut terlibat dan merasakan hasil dari pembangunan tersebut. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam semua proses pembangunan. Harus memenuhi unsur-unsur pemberdayaan masyarakat pada proses pembangunan inklusif yaitu Inklusi dan partisipasi, akses ada informasi, kapasitas organisasi lokal, dan profesionalitas pelaku pemberdayaan.

Studi terdahulu yang kedua adalah penelitian yang ditulis oleh Siwage Dharma Negara pada Tahun 2013 dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang berjudul “Membangun Perkonomian Indonesia Yang Inklusif Dan Berkelanjutan”. Latar Belakang dari penelitian ini adalah perkonomian Indonesia mengalami tantangan besar. Tantangan ini terkait upaya mengubah pola pertumbuhan ekonomi yang terlalu bergantung pada sumber daya alam yang berlimpah dan upah tenaga kerja yang murah menjadi pola pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta ramah lingkungan dan berkelanjutan. Adanya perbedaan pembangunan antara wilayah barat dan timur Indonesia.

Saran yang diberikan oleh Siwage Dharma Negara dalam penelitian tersebut adalah (1) diversifikasi sumber-sumber pertumbuhan (mengurangi ketergantungan pada eksploitasi sumber daya alam), (2) menutup kesenjangan pembangunan antara wilayah barat dan timur Indonesia, (3) mempercepat pembangunan infrastruktur untuk mendorong konektivitas dan biaya logistik yang lebih murah, (4) meningkatkan kualitas sumber daya manusia, (5) mengatasi perubahan iklim.

Studi terdahulu ketiga adalah jurnal penelitian yang ditulis oleh Agnes Vera Yanti Sitorus dan Ade Marsinta Arsani pada tahun 2018 dari Central Bureau Of Statistic Indonesia dengan judul “Komparasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Di 33 Provinsi Indonesia Tahun 2010-2015: Studi Kasus Menggunakan Metode Pendekatan ADB, WEF, dan UNDP”. Latar belakang yang mendasari penelitian ini adalah terjadinya kesenjangan antara daerah di wilayah timur dan barat Indonesia. Terjadi ketimpangan soal pendapatan dan kekayaan juga ketimpangan mengenai akses terhadap pendidikan dan kesehatan.

Dan rekomendasi saran yang diberikan oleh Agnes Vera Yanti Sitorus dan Ade Marsinta Arsani dalam penelitian tersebut adalah (1) perencanaan kebijakan dari pemerintah pusat dan daerah lebih diperhatikan lagi sasarannya, (2) meningkatkan pendidikan dan ketersediaan infrastruktur di wilayah Indonesia Timur, (3) meningkatkan kualitas sumber daya manusia, (4) pemerintah harus mengintegrasikan permasalahan ketimpangan pendapatan pada setiap program dan kebijakan, (5) pendekatan penghitungan indeks inklusif sebaiknya tidak mempertimbangkan indikator pertumbuhan ekonomi regional.

I.4.2 Manfaat Teoritik

Inklusifitas merupakan hal yang sangat penting untuk pengembangan pariwisata. Karena hal tersebut akan sangat berguna bagi kesejahteraan masyarakat dan berguna untuk pembangunan yang merata bagi seluruh masyarakat. Sehingga diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi atau rujukan oleh pemerintah yang berhubungan dengan meningkatkan pembangunan pariwisata inklusif. Dan diharapkan juga nantinya penelitian ini dapat dijadikan referensi oleh daerah-daerah lain yang memiliki potensi wisata yang baik dan ingin mengembangkan potensi di sektor pariwisatanya.

I.5 Tinjauan Teoritik

Di dalam sebuah penelitian, teori merupakan hal yang sangat penting. Teori dibutuhkan untuk memberikan pemahaman akademis secara komprehensif dan kondisi terbaru berkaitan dengan permasalahan penelitian. Teori dalam penelitian ini disusun dalam rangkaian sub bab yang membentuk pola berpikir peneliti. Adapun susunan tinjauan teoritik dalam penelitian ini adalah terdiri dari

pembangunan, pembangunan inklusif, pembangunan pariwisata inklusif dan pariwisata.

I.5.1 Pembangunan

Pada dasarnya, pengertian pembangunan secara umum adalah proses perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya, Negara satu dengan Negara lain.

Proses pembangunan menghendaki adanya pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan perubahan (*growth plus change*) dalam perubahan struktur ekonomi, dari pertanian ke industri atau jasa, perubahan kelembagaan, baik lewat regulasi maupun reformasi kelembagaan. Pembangunan secara berencana lebih dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau baru berkembang (Subandi: 2011:9-11). Theresia (2015:2), mengatakan bahwa pembangunan adalah suatu usaha atau proses perubahan demi tercapainya tingkat kesejahteraan atau kualitas hidup suatu masyarakat (dan individu-individu di dalamnya) yang berkehendak melaksanakan pembangunan itu.

Adapun pembangunan menurut beberapa ahli yaitu : pembangunan menurut Rogers (Rochajat et al: 2011:3) adalah perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa. Pembangunan dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya yang secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Transformasi dalam struktur ekonomi, misalnya, dapat dilihat melalui peningkatan atau pertumbuhan produksi, transformasi dalam struktur sosial dapat dilihat melalui pendistribusian kemakmuran melalui pemerataan memperoleh akses terhadap sumber daya sosial-ekonomi, sedangkan transformasi budaya sering dikaitkan dengan bangkitnya semangat kebangsaan dan nasionalisme, disamping adanya perubahan nilai dan norma yang dianut masyarakat. (Tikson: 2005:11).

Pembangunan merupakan suatu kenyataan fisik sekaligus tekat suatu masyarakat untuk berupaya sekeras mungkin melalui serangkaian kombinasi proses sosial, ekonomi dan institusional, demi mencapai kehidupan yang serba lebih baik. Untuk mencapai “kehidupan yang serba lebih baik” semua masyarakat minimal harus memiliki tiga tujuan inti sebagai berikut (Todaro, 2000: 28) :

- a. Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam barang kebutuhan hidup yang pokok , seperti pangan , sandang, papan, kesehatan dan perlindungan keamanan.
- b. Peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan, yang kesemua itu tidak hanya untuk memperbaiki kesejahteraan materiil , melainkan juga menumbuhkan jati diri pribadi dan bangsa yang bersangkutan.
- c. Perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan, yakni dengan membebaskan mereka dari belitan sikap menghamba dan ketergantungan, bukan hanya terhadap orang atau negara, bangsa lain, namun juga terhadap setiap kekuatan yang berpotensi merendahkan nilai-nilai kemanusiaan mereka.

Dari berbagai macam pengertian dari pembangunan maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan merupakan suatu upaya yang melibatkan masyarakat untuk melakukan proses perubahan dan sebuah transformasi yang dilakukan dalam rangka menunjang kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang ekonomi maupun sosial yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan tanpa merusak lingkungan atau kehidupan sosial dan memiliki kehidupan yang layak.

1.5.2 Pembangunan Inklusif

Inklusif secara harfiah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti “yang termasuk”. Yang artinya adalah pembangunan inklusif merupakan pembangunan yang melibatkan masyarakat luas atau semua elemen masyarakat. Menurut Oxfam, sebuah lembaga pembangunan internasional yang memobilisasi kekuatan masyarakat untuk memerangi kemiskinan, pembangunan inklusif yaitu pendekatan pembangunan yang berpihak pada masyarakat miskin yang memiliki

tujuan yang sama dan pemikiran yang sama dan menggabungkan peran semua pemangku kepentingan atau semua stakeholders termasuk juga masyarakat marjinal yang terpinggirkan untuk menangani isu-isu pembangunan. Oxfam juga menilai keberhasilan pembangunan inklusif tidak terlepas dari peran semua masyarakat, pemerintah dan pihak swasta, serta pembangunan inklusif dapat menciptakan transparansi dan akuntabilitas.

Menurut *United Nations Development Programme* (UNDP) dalam Cozzens dan Sutz (2012:11) pembangunan dapat bersifat inklusif jika semua orang atau semua kelompok berkontribusi untuk menciptakan peluang, berbagi manfaat pembangunan dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Bisa dikatakan pembangunan inklusif merupakan pembangunan untuk semua orang. Pembangunan yang bukan saja hanya orang kaya, pandai, memiliki jabatan tinggi yang bisa menikmati pembangunan, akan tetapi mereka yang miskin, yang terpinggirkan dan tidak diperhatikan pun dapat menikmati pembangunan tersebut.

Beberapa ciri dari pembangunan inklusif adalah pertumbuhan ekonomi merupakan sasaran utama tetapi bukan tujuan, pertumbuhan ekonomi merupakan sarana untuk mencapai tujuan kemakmuran bersama semua warga negara, pertumbuhan ekonomi disertai dengan kebijakan publik yang baik dapat berbuat banyak dalam rangka mengurangi ketimpangan dan mengurangi angka kemiskinan serta kebijakan dan institusi-institusi sosial non ekonomi seperti jaminan sosial, tata dan kualitas pemerintahan memiliki potensi sama penting dengan kebijakan –kebijakan ekonomi (Prasentyatoko et al. 2012).

The International Policy for Inclusive Growth (IPC) menjelaskan bahwa pembangunan inklusif adalah sebuah hasil dan proses, yang artinya bahwa semua orang dapat berpartisipasi dalam proses perumbuhan dan memastikan manfaatnya dapat dirasakan oleh semua orang secara adil dan merata (Perch dan Labbate, 2011).

Gupta et al. (2015) memandang bahwa pembangunan inklusif merupakan pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat marjinal, sektor pemerintahan, politik, dan ekonomi yang saling berkaitan dalam proses sosial

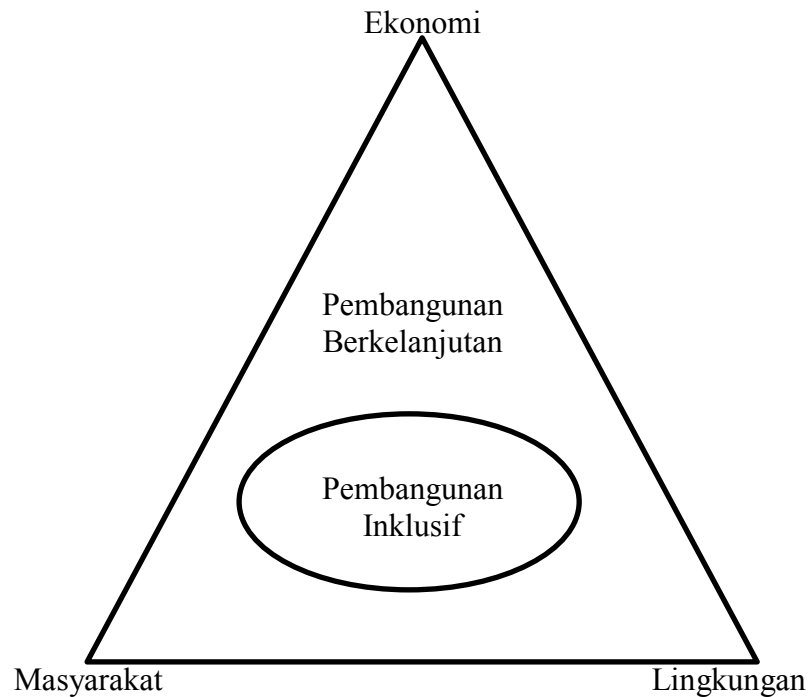
untuk kesejahteraan masyarakat, menjunjung sumber daya yang berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat.

Pendapat lain mengenai pembangunan inklusif di sampaikan oleh Cozzens & Sutzh (2012:11) yang berpendapat bahwa pembangunan inklusif adalah pembangunan yang dilakukan oleh orang-orang yang terpinggirkan. Pembangunan inklusif mencakup tindakan yang dilakukan oleh dan untuk masyarakat yang terpinggirkan.

Berdasarkan dari pendapat beberapa ahli di atas mengenai pembangunan inklusif dapat disimpulkan bahwa pembangunan inklusif merupakan pembangunan yang sangat menekankan aspek sosial diatas aspek lainnya, pemberian manfaat yang adil bagi semua yang terlibat dan melibatkan partisipasi masyarakat terutama masyarakat yang terpinggirkan.

Pada awalnya pembangunan inklusif hanya berfokus pada aspek-aspek sosial saja tetapi seiring berjalannya waktu kemudian menjadi semakin luas dan menyebar ke aspek sosial dan lingkungan. Hal tersebut seperti disampaikan oleh Zoomers (2010), Fairhead et al. (2012), dan Leach et al. (2012) bahwa komponen ekologi juga terdapat pada pembangunan inklusif dan masyarakat miskin yang tergantung pada sumber daya alam (dalam Gupta et al. 2015).

Namun dalam dunia sekarang ini pembangunan hanya berorientasi pada pertumbuhan dan pekerjaan daripada lingkungan dan masyarakat. Konsep *Green economy* dan *green growth* muncul karena kurangnya perhatian terhadap lingkungan dalam pembangunan. Konsep-konsep ini sesuai dengan teori ekologi modernisasi berdasarkan pendekatan neo-liberal dimana mengabaikan komponen sosial dari pembangunan berkelanjutan. Karena itulah pembangunan inklusif merupakan aspek sosial dan lingkungan dari pembangunan. (Gupta et al. 2015).

Gambar I.2**Posisi Pembangunan Inklusif**

Sumber: Gupta et al. (2015)

Pembangunan inklusif juga memperhatikan keadaan lingkungan sekitarnya seperti yang diungkapkan oleh Gupta et al. (2015) pembangunan inklusif dalam konteks Anthropocene mengadopsi kebutuhan standar ekosentris dan ruang ekologi secara merata dan adil kepada masyarakat ataupun negara untuk masa sekarang dan masa depan. Hal tersebut menegaskan bahwa pembangunan harus memperhatikan dampak lingkungan. Berikut ini lima kondisi pembangunan inklusif dalam konteks Anthropocene:

1. Menggunakan *multiple set* dalam batas ekosentris guna mempertahankan kapasitas regeneratif bumi secara keseluruhan.
2. Membagi secara rata hak, tanggung jawab, dan risiko terkait ekosentris untuk masyarakat dan negara untuk masa sekarang dan masa depan.
3. Membangun masyarakat yang adaptif termasuk masyarakat yang terpinggirkan.
4. Bekerja sama dengan instansi atau lembaga lain dalam pembangunan dan investasi.

5. Semua *stakeholders* harus ikut serta dalam menciptakan pendekatan holistik melalui langkah-langkah interdisipliner dan pertukaran informasi.

Ada beberapa ciri-ciri sebuah pembangunan bersifat inklusif atau tidak, berikut ciri-ciri dari pembangunan inklusif menurut (Prasentyatoko et al. 2012:4) :

1. Pertumbuhan ekonomi merupakan sesuatu yang penting, tapi itu bukanlah tujuan.
2. Pertumbuhan ekonomi merupakan alat untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, baik laki-laki atau perempuan, baik kaya atau miskin.
3. Pertumbuhan ekonomi dan kebijakan publik memberikan peranan penting untuk mengurangi kemiskinan dan disparitas.
4. Kebijakan dan institusi sosial non-ekonomi memiliki kedudukan yang setara. Artinya, institusi jaminan sosial, tata pemerintahan/kualitas pemerintahan memiliki kedudukan yang sama penting dengan kebijakan ekonomi (moneter dan fiskal).

Keterlibatan masyarakat merupakan hal yang mutlak dan peran aktif dari birokrasi dalam sebuah pembangunan inklusif karena hal tersebut sesuai dengan yang disebut sebagai pembangunan bersama.

I.5.3 Pembangunan Pariwisata Inklusif

Pembangunan inklusif dapat dipahami sebagai pariwisata transformatif dimana kelompok marjinal terlibat dalam proses produksi yang layak atau konsumsi pariwisata dan pembagian manfaatnya. Ini artinya sesuatu hanya dapat dianggap sebagai pariwisata inklusif jika kelompok-kelompok yang terpinggirkan terlibat dalam proses produksi dan konsumsi pariwisata tersebut dan saling berbagi manfaat. Produksi dan konsumsi adalah komponen kunci dari definisi pariwisata inklusif. Dan itu juga termasuk tanggung jawab kepada orang lain dan lingkungan sekitar (Scheyvens dan Biddulph, 2017).

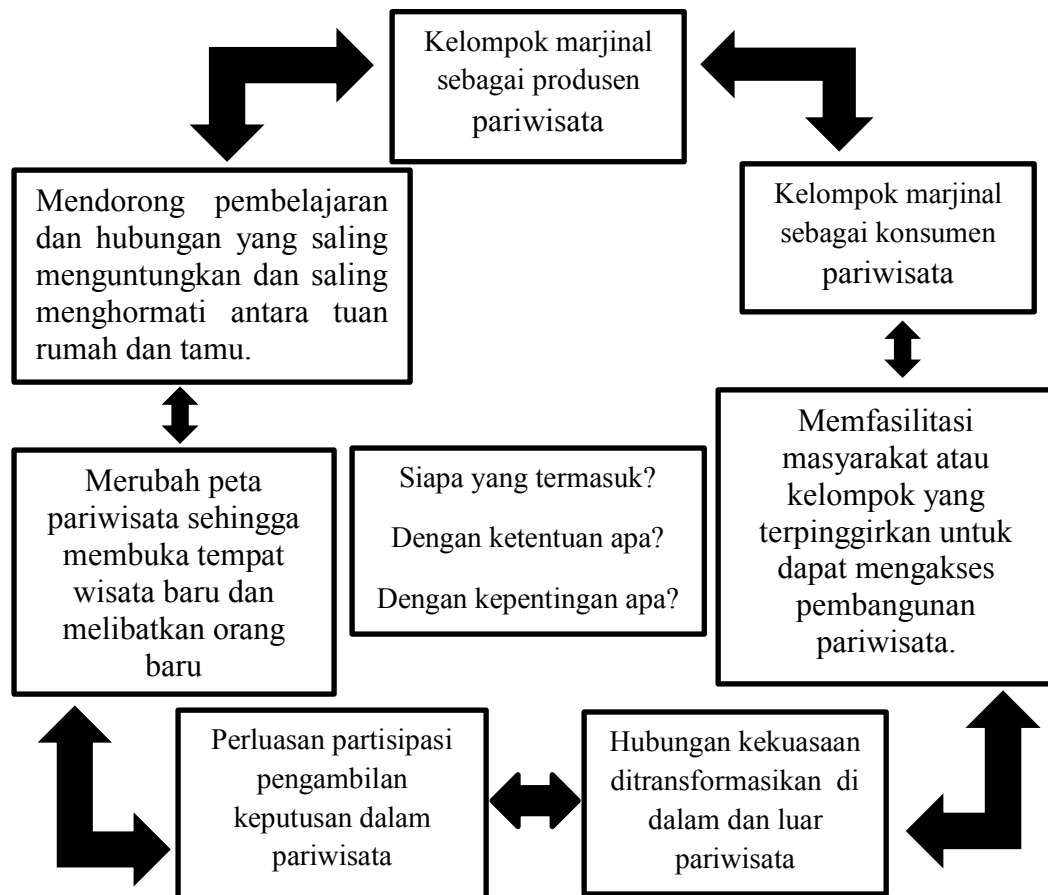
Lebih lanjut lagi Scheyvens dan Biddluph (2017) mengungkapkan komponen-komponen pariwisata inklusif sebagai berikut.

1. Mengatasi permasalahan atau hambatan bagi kelompok atau masyarakat yang kurang beruntung untuk mengakses pariwisata baik sebagai produsen dan konsumen.
2. Memfasilitasi masyarakat atau kelompok yang terpinggirkan untuk dapat mengakses pembangunan pariwisata.
3. Menentang hubungan kekuasaan yang dominan dalam pembangunan pariwisata.
4. Memperluas jangkauan orang yang berkontribusi dalam pengambilan keputusan tentang pembangunan pariwisata.
5. Memberikan peluang bagi tempat-tempat baru untuk dijadikan objek wisata.
6. Mendorong pembelajaran hubungan yang saling menguntungkan dan saling menghormati antara tuan rumah dan tamu.

Maka secara analitik, komponen-komponen ini menyediakan kerangka kerja konseptual ke tingkat pengembangan pariwisata inklusif, yang mana dapat dilihat dari ambisi dan prestasi dalam kaitannya dengan tujuh elemen berikut.

Gambar I.3

Elemen-Elemen Pariwisata Inklusif



Sumber: Scheyvens dan Biddulph, 2017:6

Berikut akan dijelaskan, elemen-elemen pariwisata inklusif.

Sebagaimana dijelaskan dalam bagan tersebut, elemen-elemen pariwisata inklusif, terdiri dari elemen-elemen berikut ini:

a. *Kelompok marginal sebagai produsen pariwisata*

Di dunia, masuknya masyarakat setempat sebagai penghasil dan untuk pasar pariwisata merupakan perjuangan jangka panjang dan berkelanjutan. Sebagai contoh, petani kecil adalah salah satu kelompok yang biasanya tidak mendapatkan keuntungan besar dari pertumbuhan pariwisata, bahkan di mana ada minat yang signifikan dalam memanfaatkan produk segar lokal di daerah wisata (Telfer & Wall, 2000; Torres, 2002). Dengan demikian, banyak inisiatif pariwisata inklusif yang baru muncul berkaitan dengan melibatkan berbagai kelompok orang sebagai produsen pariwisata. Sebagai contoh, gerakan Fair Trade

in Tourism (FTT) secara aktif mencoba untuk mengubah kesepakatan buruk yang beberapa produsen dapatkan dari industri pariwisata. Secara khusus, hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa produsen pariwisata (kerajinan, akomodasi, produksi, dll) mendapatkan kesepakatan yang adil, dan untuk meningkatkan kesadaran konsumen tentang FTT. Di Afrika Selatan, sebuah organisasi FTT Nasional menyatakan bisnis pariwisata dan dengan demikian memberikan jaminan bagi konsumen mengenai etika bisnis (Scheyvens, 2011, hal. 34).

b. Kelompok marginal sebagai konsumen pariwisata

Cara lain untuk memastikan bahwa pariwisata inklusif adalah melalui pelebaran akses ke non-mainstream konsumen pariwisata seperti pariwisata sosial dan pariwisata yang bisa diakses (bagi mereka yang cacat). Sebagai contoh, di Britania Raya telah ditemukan bahwa masyarakat yang kurang beruntung secara ekonomi mendapatkan banyak manfaat kesejahteraan dari kemampuan untuk berpartisipasi dalam dalam kegiatan pariwisata dan itu merupakan berbalik dari kegiatan mereka sehari-hari yang tidak pernah terlibat dalam urusan pariwisata dan mereka dapat berhubungan dengan orang lain (Morgan et al., 2015).

Pariwisata juga dapat menjadi kurang eksklusif melalui memastikan bahwa tujuan yang sering dikunjungi oleh wisatawan dan penduduk setempat, yang dapat didorong melalui kampanye pemasaran domestik, dan juga dukungan untuk prakarsa pariwisata sosial. Ada banyak manfaat ekonomi dan sociocultural pariwisata domestik seperti, termasuk mengurangi hambatan antara kelompok etnis yang berbeda dan meningkatkan apresiasi budaya, linguistik dan perbedaan agama, membantu membangun rasa kebanggaan dan identitas nasional, revitalisasi ikatan sosial antara keluarga yang diperpanjang dan kelompok masyarakat; mendorong pelayanan lokal dari tuntutan wisatawan; dan menyebarkan manfaat ekonomi ke daerah yang tidak sering dikunjungi oleh wisatawan mancanegara (Mawdsley, 2009; Scheyvens, 2007). Secara sosial dan politik, warga negara manapun harus merasa dapat menikmati atraksi negara mereka sendiri tetapi karena sikap neo-kolonial dapat ada hambatan yang mencegah akses tersebut.

c. Memfasilitasi masyarakat atau kelompok yang terpinggirkan untuk dapat mengakses pembangunan

Sementara pejabat pemerintah sering sibuk dengan manfaat ekonomi pariwisata, manfaat sosial juga bisa sangat penting. Pendekatan inklusif untuk pariwisata, misalnya, mengakibatkan peningkatan kesatuan di pedesaan, kota, mengurangi kejahatan, rasa keamanan yang lebih baik, dan tempat yang lebih menyenangkan untuk hidup. Dengan meningkatnya ketimpangan dan disfungsi sosial yang terkait dalam banyak masyarakat di dunia, sekarang ada minat yang lebih besar dalam nilai mendobrak hambatan antara masyarakat (termasuk mereka yang tinggal di pinggiran kota yang berbeda dalam kota yang sama), memberikan kesempatan untuk mengembangkan saling pengertian, dan mengatasi stereotip negatif. Misalnya, Higgins-Desbiolles (2016, hlm. 1280) menunjukkan bahwa di Festival adat Australia dapat menghasilkan 'visibilitas positif' bagi masyarakat adat dan bahkan memiliki 'peran rekonsiliasi' dalam situasi bahaya masa lalu dari masyarakat setempat. Banyak tergantung namun, pada kepentingan yang tercermin dalam pariwisata yang dihasilkan, dan dalam hal ini ada kekhawatiran bahwa Festival itu berubah dengan cara tumbuhnya jumlah wisatawan sementara meruntuhkan nilai sosial dan budaya Festival, terutama dari perspektif pribumi (Higgins-Desbiolles, 2016).

Di Afrika Selatan, pemerintah telah merubah pariwisata ke dalam pariwisata inklusif, dan melihat ini sebagai sarana untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat di pinggiran. Sebagai Menteri Pariwisata Afrika Selatan, Derek Hanekom, mengatakan dalam 2015, kami ingin membuat seluruh sektor lebih inklusif dan representatif dengan membawa orang yang telah terpinggirkan dalam ekonomi pariwisata (dikutip dalam Butler & Rogerson, 2016, hal 265).

Ketika konsep ini diterapkan ke kota Dullstroom, yang disebutkan di atas, yang telah melihat pertumbuhan di sektor pariwisata, Fly Fishing dan agritourism, Butler dan Rogerson (2016) menemukan bukti jelas pendekatan pembangunan pariwisata inklusif. Warga yang disurvei mencatat manfaat sosial sangat penting bagi mereka. Menariknya, Selain manfaat yang sering dikutip seperti kemampuan dan pemberdayaan, warga mengapresiasi peningkatan keamanan kota mereka yang terkait dengan pertumbuhan pariwisata, bersama

dengan langkah penting untuk mengatasi ketidakpercayaan antara kelompok etnis (yang sekarang lebih cenderung bekerja sama dalam perusahaan pariwisata): ' contoh tambahan pemberdayaan sosial yang mengkhawatirkan perkembangan hubungan positif antara anggota masyarakat hitam dan putih ' (Butler & Rogerson, 2016, hlm. 276).

d. Hubungan kekuasaan ditransformasikan di dalam dan di luar pariwisata

Semua elemen pariwisata inklusif yang telah kita diskusikan di atas memberikan potensi kontribusi tambahan untuk tujuan jangka panjang yang lebih besar dari mentransformasikan hubungan kekuasaan dan mengakhiri pengucilan sosial. Upaya langsung menjungkirbalikkan hubungan kekuasaan, Namun, apakah di dalam industri pariwisata atau di masyarakat yang lebih luas, pasti memungkinkan. Struktur dan sistem sosial yang memarginalkan dan memiskinkan mungkin memiliki tingkat ketahanan tinggi dan ketergantungan (Baird, Chaffin, & Wrathall, 2017). Dengan demikian beberapa inisiatif baru seperti Kemitraan Swasta-Masyarakat di Uganda, yang dibentuk khusus untuk berbagi kepemilikan usaha pariwisata seperti ecolodge kelas atas, gagal mencapai 'kemitraan' sejati (Ahebwa, Van der Duim, & Sandbrook, 2012). Namun demikian ada contoh transformasi kehidupan sosial dan ekonomi sedemikian rupa individu dan kelompok yang terpinggirkan dan miskin dimasukkan dengan persyaratan yang layak dan adil, dan kepemilikan bersama yang benar-benar mengalihkan kekuasaan ke yang sebelumnya dieksploitasi.

Inisiatif positif termasuk yang menyerahkan kepemilikan dan pengendalian bisnis pariwisata kepada karyawan. Sebuah contoh menarik dari Siprus Utara adalah Dome Hotel, yang dulunya milik negara, dan menjadi milik karyawan setelah Serikat buruh dan karyawan mencari alternatif perencanaan privatisasi Hotel. Perusahaan ini sekarang dimiliki oleh 49 karyawan hotel dan Serikat pekerja pariwisata, dan dioperasikan oleh solidaritas perusahaan pariwisata (Timur & Timur, 2015). Melalui sistem ini, setiap karyawan memiliki satu suara atas keputusan yang terkait pemasaran, upah, distribusi keuntungan, dan investasi. Sistem kepemilikan karyawan secara luas dihargai oleh pemilik

baru dan masyarakat yang lebih luas, yang memanfaatkan kebijakan hotel ' mendukung ekonomi lokal ', dan juga mengalami manfaat sosial seperti diskon akses ke fasilitas hotel. Menariknya, hotel ini juga mendapatkan manfaat langsung dari hal ini, termasuk pekerjaan lokal yang lebih stabil, lebih banyak pelanggan kembali (sebagian berhubungan dengan hubungan yang dikembangkan dengan staf jangka panjang), dan pelestarian sebuah hotel ikonik (Timur & Timur, 2015). Hal ini dapat memberikan sumber inspirasi untuk karyawan serupa lainnya kepemilikan atau pekerja koperas, untuk memungkinkan mereka untuk menemukan pijakan yang lebih substansial di pasar pariwisata sehingga mengganggu konsolidasi kekuasaan di tangan sejumlah kecil hotel besar dan Biro wisata.

e. Perluasan partisipasi dalam pengambilan keputusan pariwisata

Siapa yang mengontrol dan membuat keputusan tentang pengembangan pariwisata memiliki pengaruh besar terhadap apakah pariwisata akan berkontribusi pada pembangunan inklusif. Pemain industri pariwisata secara terpusat prihatin dengan maksimalisasi keuntungan sehingga jika mereka dibiarkan untuk mengatur diri sendiri dan mengadopsi kebijakan yang dimonitor tanggung jawab sosial perusahaan, tidak mungkin bahwa industri akan selalu bertindak secara bertanggung jawab dan mencerminkan kepentingan masyarakat luas. Inilah sebabnya Pingeot (2014), mengacu pada pengaruh bisnis besar atas pengembangan, memperingatkan terhadap pemberian pengaruh perusahaan terhadap pembuatan kebijakan dan mengabaikan tanggung jawab mereka dalam menciptakan dan memperburuk banyak masalah yang Agenda Post-2015 seharusnya untuk mengatasi ' (Pingeot, 2014, hal 6).

Ketika kita melihat secara dekat apa yang diusulkan oleh pelaku bisnis dalam kaitannya dengan pengembangan, kepentingan diri sendiri adalah tujuan yang jelas. Inilah sebabnya mengapa ada fokus pada perubahan sukarela daripada regulasi, dan tindakan lunak untuk mengurangi dampak lingkungan daripada fundamental perubahan produksi dan konsumsi (Pingeot, 2014, p. 29). Ini adalah keprihatinan yang lebih besar ketika kita mempertimbangkan bahwa tahun terakhir telah melihat konsolidasi kekuatan Organisasi Pariwisata terbesar terkait

melalui merger dan pertumbuhan, daripada pembongkaran kekuasaan mereka (Scheyvens, 2011).

Sebuah counter untuk ini, dan strategi yang lebih inklusif pariwisata, adalah untuk meningkatkan warga negara berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan pariwisata. Timotius (2007, p. 203), misalnya, menunjukkan bagaimana desentralisasi kekuatan pengambilan keputusan dengan memberdayakan “orang lokal di lapangan” dapat menyebabkan hasil pembangunan yang lebih efektif. Setelah melakukan penelitian dengan pemuda Tibet yang tinggal di daerah pinggiran kota Lhasa, Tibet, dan meminta mereka untuk membandingkan nilai dua Taman Wisata di daerah mereka, Wu dan Pearce (2016) menemukan bahwa orang muda lebih suka kontrol masyarakat yang kuat atas pariwisata daripada pariwisata yang dikelola oleh perusahaan luar. Hal ini dapat bertentangan dengan pandangan beberapa orang bahwa perusahaan luar lebih disukai karena keuntungan yang mereka bawa dalam hal potensi investasi dan pengetahuan bisnis. Namun hal ini tidak mencerminkan pandangan setidaknya satu segmen besar masyarakat. Sangat penting bahwa penelitian lebih lanjut yang secara aktif mendengarkan suara masyarakat dilakukan untuk melawan perspektif sentris industri dan menginformasikan pendekatan inklusif pengembangan pariwisata.

f. Merubah peta pariwisata sehingga membuka tempat wisata baru dan melibatkan orang baru.

Kami juga berpendapat bahwa ada dimensi teritorial untuk pariwisata inklusif dalam hal itu membuka lebih banyak tempat dan ruang sebagai situs pariwisata. Seperti Kitchin dan Dodge berpendapat, ' pemetaan adalah proses reterritorialisasi yang konstan '(Kitchin & Dodge, 2007, 331). Dengan demikian, tempat yang tidak secara konvensional sering dikunjungi oleh wisatawan seperti di bawah sumber daya atau lingkungan sosial ekonomi yang lebih rendah dapat dibayangkan sebagai tempat wisata, dan termasuk dalam peta wisata. Dalam melakukannya, individu memiliki kesempatan untuk menemukan lokasi baru untuk tempat wisata baru dan juga dapat terlibat dalam kegiatan pariwisata (Edensor, 2015).

g. Mendorong pembelajaran dan hubungan yang saling menguntungkan dan saling menghormati antara tuan rumah dan tamu.

Salah satu fokus pariwisata inklusif adalah menemukan cara untuk menampung masyarakat, termasuk masyarakat adat, dan orang-orang yang rentan dan miskin di masyarakat tuan rumah, dapat mewakili diri mereka dengan cara yang mereka anggap tepat dan bermartabat. Jadi, misalnya, alih-alih diwakili oleh orang lain sebagai memiliki budaya 'tradisional', Maori orang-orang Selandia Baru, melalui bisnis pariwisata mereka, menegosiasikan kembali jalan masuk yang diwakili oleh wisatawan dan menunjukkan bagaimana mereka berinteraksi dan menggambar dari budaya lain juga: " perbedaan " bukan sifat bawaan dan tetap. Tradisi 'tetap' tetapi negosiasi yang sedang berlangsung kompleks '(Amoamo & Thompson, 2010, hlm. 47). Dalam contoh lain, Seiver dan Matthews (2016) memberikan perbandingan representasi yang menarik orang Aborigin dalam gambar tujuan untuk empat wilayah di Australia. Sementara satu wilayah hampir menghadap masyarakat Aborigin, di tujuan lain pariwisata Aborigin menggabungkan perspektif Aborigin dan menghadirkan budaya sebagai hidup dan dinamis, yang membantu mengganggu stereotip.

Inisiatif untuk membuat pariwisata lebih inklusif dapat dilihat sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas interaksi manusia dan untuk memastikan bahwa pariwisata memberikan manfaat kepada mereka yang terpinggirkan. Mengingat persaingan ketat dalam industri dengan dorongan untuk menjaga pasar tetap rendah biaya. Pendekatan pariwisata inklusif sedang diterapkan diberbagai daerah dan bagaimana orang-orang yang terpinggirkan terlibat dalam pembangunan pariwisata dan juga betapa pentingnya keterlibatan banyak orang dalam pengambilan keputusan dalam pembangunan pariwisata. Pariwisata inklusif akan memberikan jalan keluar untuk menyelesaikan masalah atau hambatan yang ada. Pariwisata inklusif bukan saja hanya sekedar branding tetapi pariwisata inklusif akan memberikan sebuah pemikiran yang kritis dan inovatif. Lebih jauh lagi, jelas pariwisata inklusif menyadarkan kita bahwa kita tidak dapat mengandalkan inisiatif dari sektor swasta atau niat baik sendiri, tetapi melainkan membutuhkan kerangka kerja, peraturan nasional dan internasional juga memiliki peran penting untuk dimainkan. (Scheyvens dan Biddulph, 2017)

I.5.4 Pariwisata

I.5.4.1 Pengertian Pariwisata

Seusungguhnya, pariwisata telah lama menjadi perhatian, baik dari segi ekonomi, politik, administrasi kenegaraan, maupun sosiologi, sampai saat ini belum ada kesepakatan secara akademis mengenai apa itu pariwisata. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa pariwisata adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan rekreasi.

Secara etimologi, kata pariwisata berasal dari dua kata yaitu *pari* dan *wisata*. *Pari* berarti “banyak” atau “berkeliling”, sedangkan *wisata* berarti “pergi” atau “bepergian”. Jadi dapat disimpulkan bahwa pariwisata adalah kegiatan bepergian atau perjalanan yang dilakukan secara berkali-kali.

Dan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menjelaskan bahwa :

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam waktu sementara.
2. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah daerah.
4. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

World Tourism Organizations (WTO) menjelaskan pariwisata merupakan berbagai aktivitas yang dilakukan orang-orang yang mengadakan perjalanan untuk dan tinggal di luar kebiasaan lingkungannya dan tidak lebih dari

satu tahun berturut-turut untuk kesenangan, bisnis dan keperluan lain (Muljadi A.J, 2009:8).

Dari penjelasan di atas, pariwisata dalam penelitian ini didefinisikan sebagai Perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok ke luar dari kebiasannya untuk mencari kesenangan, bisnis, atau kepentingan lain.

I.5.4.2 Sistem Pariwisata

Pariwisata merupakan suatu aktivitas yang kompleks, yang dapat dipandang sebagai sebuah sistem yang besar, yang mempunyai berbagai komponen seperti ekonomi, ekologi, politik, sosial, budaya, dan lainnya. Dalam sistem pariwisata, ada banyak aktor yang berperan dalam menggerakkan sistem. Aktor tersebut adalah insan-insan pariwisata yang ada pada berbagai sektor. Insan pariwisata dibagi menjadi tiga pilar utama, yaitu:

1. Masyarakat

Yang termasuk masyarakat adalah masyarakat umum yang ada di sekitar destinasi, sebagai pemilik sumber daya. Juga tokoh-tokoh masyarakat, intelektual, LSM, dan media massa

2. Swasta

Kelompok swasta adalah asosiasi usaha pariwisata dan para pengusaha.

3. Pemerintah

Semua yang ada pada berbagai wilayah administrasi, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan seterusnya.

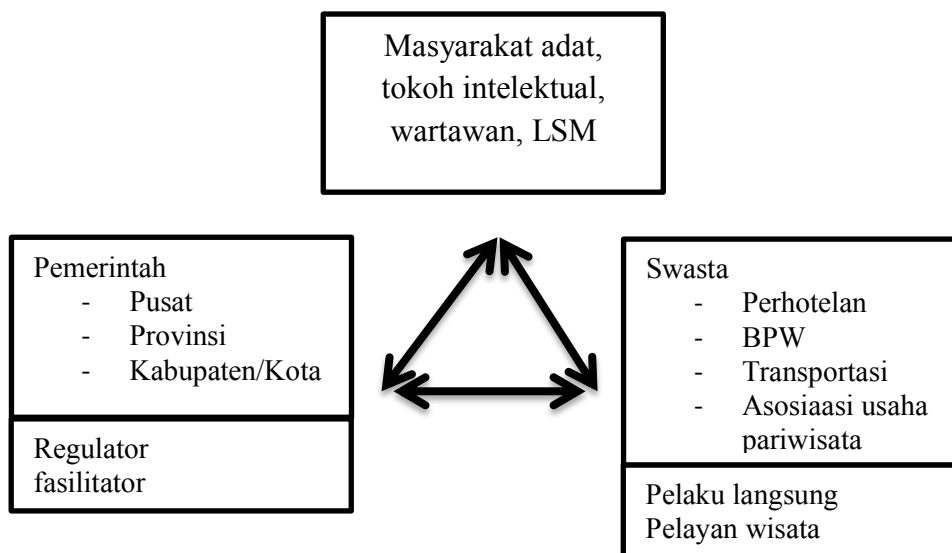
Penyelenggaraan sistem pariwisata dapat berjalan dengan sempurna apabila semua komponen-komponen saling bekerja sama dan saling mendukung satu dengan yang lainnya. Seperti kewajiban pemerintah daerah adalah merencanakan, pembangunan, pengorganisasian, pemeliharaan dan pengawasan dengan pemerintah daerah lainnya yang terkait untuk mendukung kegiatan pariwisata.

Pemerintah daerah beserta instansi-instansinya, industri jasa dan masyarakat mempunyai kewajiban untuk duduk bersama bekerja sama dengan pemerintah daerah lainnya dalam mengemas paket wisata. Demikian pula

masyarakat sekitar objek wisata harus ikut berpartisipasi memberikan rasa aman dan nyaman kepada wisatawan. Selain itu, masyarakat harus ikut terlibat dalam pengambilan keputusan pembangunan pariwisata, bersama-sama pemerintah daerah dan jasa-jasa kepariwisataan menjaga dan memelihara sarana-sarana yang terdapat pada objek wisata.

Gambar I.4

Sistem Pariwisata dalam Tiga Pilar



Sumber: Pitans dan Gayatri dalam Suwena dan Widyatmaja,(2010:32)

I.5.4.3 Pariwisata Dalam Pembangunan

Seberapa penting pariwisata dalam sebuah pembangunan. Menurut Wahab (1976:12) dalam Yoeti, A. Oka (2008:36), pariwisata merupakan faktor paling penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara, karena kegiatannya mendorong perkembangan beberapa sektor perekonomian nasional, misalnya:

1. Peningkatan kegiatan perekonomian sebagai akibat dibangunnya prasarana dan sarana demi pengembangan pariwisata.
2. Meningkatkan industri-industri baru yang erat kaitannya dengan pariwisata.

3. Meningkatkan hasil pertanian dan peternakan untuk kebutuhan hotel dan restoran.
4. Memperluas barang-barang lokal untuk lebih dikenal oleh dunia internasional termasuk makanan dan minuman.
5. Meningkatkan permintaan terhadap: handicrafts, souvenir goods, art painting, dsb.
6. Meningkatkan perolehan devisa negara, sehingga dapat mengurangi beban defisit neraca pembayaran.
7. Memberikan kesempatan berusaha, kesempatan bekerja, peningkatan penerimaan pajak bagi pemerintah, dan peningkatan pendapatan nasional.
8. Membantu membangun daerah-daerah terpencil yang selama ini tidak tersentuh pembangunan.
9. Mempercepat perputaran perekonomian pada negara-negara penerima kunjungan wisata.
10. Dampak penggandaan (multiplier effect) yang ditimbulkan pengeluaran wisatawan, sehingga memberi dampak positif bagi pertumbuhan daerah tujuan wisata yang dikunjungi wisatawan.

I.6 Definisi Konsep

Definisi konsep merupakan unsur penelitian yang menjelaskan karakteristik masalah yang hendak diteliti. Peneliti bisa memanfaatkan dan menggabungkan definisi yang telah dipakai dan kemudian menghubungkan definisi tersebut dengan tujuan ilmiah yang di ingin dicapai.

- a. *Pembangunan* : suatu upaya yang melibatkan masyarakat untuk melakukan proses perubahan dan sebuah transformasi yang dilakukan dalam rangka menunjang kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang ekonomi maupun sosial yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan tanpa merusak lingkungan atau kehidupan sosial dan memiliki kehidupan yang layak.
- b. *Pembangunan Inklusif* : Konsep pembangunan yang menekankan aspek sosial dengan mendistribusikan manfaat pembangunan secara

adil dan merata, menghilangkan eksklusivitas, dan melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan dalam pembangunan terutama untuk kelompok-kelompok atau masyarakat yang terpinggirkan.

- c. *Pariwisata* : Perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok ke luar dari kebiasannya untuk mencari kesenangan, bisnis, atau kepentingan lain.
- d. *Pembangunan Pariwisata Inklusif* : Pembangunan pariwisata yang melibatkan kelompok-kelompok yang terpinggirkan terlibat dalam proses produksi dan konsumsi pariwisata tersebut dan saling berbagi manfaat.

I.7 Metodologi Penelitian

Di dalam sebuah penelitian ilmiah, metode merupakan instrumen yang sangat penting untuk digunakan dalam menjawab perumusan masalah. Metode penelitian diartikan sebagai pembahasan mengenai konsep teoritik berbagai metode, kelebihan dan kekurangan, yang dalam karya ilmiah dilanjutkan dengan pemilihan metode yang digunakan (Hidayat dan Sedarmayanti, 2002:25).

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan dalam penelitian ini, peneliti berusaha memahami, mengetahui, dan memperoleh gambaran atas fenomena sosial dan menjelaskannya. Maka dari itu, metodologi penelitian yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Adapun alasan menggunakan metode penelitian kualitatif ini adalah karena peneliti sedang mencoba memahami suatu fenomena dan berusaha untuk mengungkapkan bagaimana pengembangan pembangunan pariwisata di Pulau Bawean dan apakah pengembangan pembangunan pariwisata di Pulau Bawean sudah bersifat inklusif.

Menurut Saryono (2010:1) Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menggambarkan, menjelaskan, menemukan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Sementara Sugiyono (2015:15) menyimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah metode penelitian

yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah.

Dapat disimpulkan bahwa metode penelitian kualitatif adalah penelitian ilmiah yang digunakan untuk meneliti objek dengan kondisi alamiah dengan menjelaskan, menggambarkan, mendeskripsikan objek yang diteliti secara terperinci dan menghasilkan penelitian kualitatif yang lebih menekankan makna daripada generalisasi.

I.7.1 Tipe Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian ini, maka peneliti memilih untuk menggunakan tipe penelitian deskriptif. Tipe penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara terperinci mengenai fenomena-fenomena sosial tertentu yang berkenaan dengan masalah dan untuk diteliti. Menurut Nazir (2009:54), penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti.

I.7.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah wilayah dimana penelitian itu dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang penting dalam penelitian kualitatif, karena berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah melakukan penelitian. Lokasi penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah wisata di Pulau Bawean. Pulau Bawean merupakan salah satu destinasi wisata di Kabupaten Gresik yang saat ini sedang dalam tren yang positif dalam pengembangan daerah wisatanya. Selain karena keindahan alamnya yang tak perlu di ragukan lagi, wisata di Pulau Bawean mulai menunjukkan geliatnya dengan banyaknya wisatawan yang datang ke Pulau Bawean dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Dan kerana penulis berasal dari Kabupaten Gresik sehingga rasa kedaerahannya muncul. Dengan banyaknya wisatawan yang datang membuat warga sekitar dan pengusaha banyak yang turut berkontribusi dan berpartisipasi dalam pengembangan wisata di Pulau Bawean. Lokasi lain

penelitian ini adalah Kantor Kecamatan Sangkapura, juga kantor Desa Sidogedungbatu, dan Kantor Desa Daun, Lokasi ini dipilih karena terdapat objek-objek wisata yang populer di Pulau Bawean dan juga mengetahui tentang pengembangan pariwisata di Pulau Bawean. Penelitian ini juga akan dilakukan di kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kawasan Wisata Bawean karena mereka dinilai mengetahui seluk beluk fenomena-fenomena pariwisata yang ada di Pulau Bawean.

Dan tentunya juga akan dilakukan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kabupaten Gresik. Karena sesuai dengan tupoksinya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gresik lah yang menjadi pelaksana program dan kegiatan pengembangan dan pembangunan sektor pariwisata yang meliputi pendataan, pengembangan, pengelolaan pemasaran pariwisata, promosi dan kerjasama, data dan informasi pariwisata serta pengembangan dan pengeleolaan industri pariwisata, tata kelola destinasi dan daya tarik wisata, pengembangan dan pembangunan sarana penunjang wisata, serta promosi dan informasi pariwisata (www.disparbud.gresikkab.go.id diakses pada tanggal 20 September 2019 pukul 00.35).

I.7.3 Teknik Penentuan Informan

Informan merupakan hal yang penting bagi sebuah penelitian. Karena informan merupakan sumber utama dalam pengumpulan data. Informan merupakan orang-orang tertentu yang diharapkan dapat memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian dan juga diharapkan paham dan mengetahui fokus dan tujuan dari penelitian tersebut.

Dan di dalam penelitian ini teknik penentuan informan yang digunakan adalah *purposive sampling*. *Purposive Sampling* merupakan teknik penentuan informan yang dilakukan dengan cara memilih siapa yang terbaik dalam memberikan informasi yang dibutuhkan. Menurut Sutrisno Hadi dalam Hamidi (2008:89), *purposive sampling* adalah pemilihan sekelompok subyek didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Sebutan *purposive* ini menunjukkan bahwa teknik ini digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.

Menurut Satori dan Komariah (2010:53) mengutip pendapat dari Lincoln dan Guba mengemukakan bahwa ciri-ciri khusus sampel *purposive* adalah sebagai berikut:

- a. *Emergent Sampling Design*; bersifat sementara; sebagai pedoman awal terjun ke lapangan, setelah sampai di lapangan boleh saja berubah sesuai dengan keadaan.
- b. *Serial selection of sample units*; menggelinging seperti bola saju (*snowball*); sesuai dengan petunjuk yang didapatkan dari informan-informan yang telah diwawancarai.
- c. *Continuous adjustment of „focusing“ of the sample*; siapa yang akan dikejar sebagai informan baru disesuaikan dengan petunjuk informan sebelumnya dan sesuai dengan kebutuhan penelitian, unit sampel yang dipilih makin terarah sejalan dengan terarahnya fokus penelitian.
- d. *Selection to the point of redundancy*; pengembangan informan dilakukan terus sampai informasi mengarah ke titik jenuh.

Dalam penelitian ini, peneliti telah mewawancarai sebanyak 18 orang informan yang mana keberadaan informan ini berkaitan dengan pengembangan pariwisata yang ada di Pulau Bawean. Berikut Daftar informan yang telah di wawancarai:

1. Bapak Dedy (Staf Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gresik)
2. Bapak Imran (Kepala UPT Pariwisata Bawean)
3. Bapak Hamim (Camat Kecamatan Sangkapura)
4. Bapak Abdul Aziz (Kepala Desa Daun)
5. Bapak Muadz Akbar (Kepala Desa Sidogedungbatu)
6. Bapak Subhan (Ketua Kelompok Masyarakat Desa Daun)
7. Bapak Saidi (Ketua Kelompok Masyarakat Desa Sidogedungbatu)
8. Bapak Imam (Pengelola Wisata Mangrove Hijau Daun)
9. Bapak Ridwan (Pengelola Wisata Pantai Mombhul)
10. Bapak Badrussalam (Pemilik Penyewaan Perahu)
11. Bapak Ramli (Pemilik Penyewaan Sepeda Motor)

12. Bapak Rusdi (Pemilik Penginapan)
13. Bapak Heri (Karyawan Penginapan)
14. Bapak Agus (Tukang Ojek Pelabuhan)
15. Bapak Aminullah (Porter Pelabuhan)
16. Ibu Siti (Pedagang Kaki Lima)
17. Ibu Biyah (Pedagang Kaki Lima)
18. Ibu Qurrotul Aini (Pemilik Warung)

I.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan fase yang sangat penting dari sebuah penelitian. Dengan pengumpulan data maka akan diketahui permasalahan yang ada pada penelitian tersebut. Teknik pengumpulan data merupakan sebuah cara yang sistematis untuk mendapatkan data yang diperlukan. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam mengumpulkan data yakni observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi (gabungan). Dan data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan berbagai cara yang disesuaikan dengan informasi yang dibutuhkan. Menurut Arikunto (2006:221), antara lain dilakukan dengan cara :

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu. Wawancara ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan, dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan 18 orang informan.

Pendekatan wawancara yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (*debt interview*), dimana peneliti melakukan dialog yang sifatnya terbuka dengan informan dimana informan dapat memberikan informasi secara jelas dan terbuka sesuai dengan pertanyaan yang diajukan dan topik yang dibicarakan. Wawancara mendalam (*debt interview*) dilakukan untuk mendapat informasi yang jelas dan senyatanya sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan dan yang dialami oleh informan. Dalam penelitian ini

peneliti menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) dalam melakukan wawancara agar wawancara yang dilakukan terfokus dan tidak meluas ke topik yang lain. Dalam melakukan wawancara peneliti menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Jawa agar memudahkan untuk mendapatkan informasi. Berikut akan dijelaskan tahapan wawancara yang dilakukan oleh peneliti:

- a. Sebelum melakukan wawancara peneliti mulai dengan mengurus surat izin penelitian di bagian akademik FISIP UNAIR dan kemudian mengurus surat izin penelitian di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik, setelah surat izin keluar barulah peneliti melakukan penelitian lapangan. Wawancara dilakukan diberbagai tempat seperti misalnya wawancara dengan Bapak Dedy selaku perwakilan dari Disparbud dilakukan di kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gresik. Wawancara dengan Bapak Dedy dilakukan secara formal dan mendalam guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan.
- b. Kemudian peneliti datang ke kantor Kecamatan Sangkapura dengan membawa surat izin penelitian untuk menemui Bapak Hamim selaku Camat Kecamatan Sangkapura. Pada hari itu juga peneliti dapat langsung menemui Bapak Hamim dan langsung melakukan wawancara di ruang kerja Camat. Wawancara berlangsung lancar Bapak Hamim memberikan informasi yang jelas. Kemudian Bapak Hamim juga memberikan saran untuk juga melakukan wawancara ke Bapak Imran selaku ketua UPT pariwisata bawean dan juga ke Bapak Subhan selaku ketua Pokmas Desa Daun dengan memberikan nomor telepon untuk dihubungi. Setelah dari Kecamatan Sangkapura peneliti langsung menuju kantor UPT pariwisata bawean, setibanya disana peneliti menunggu beberapa menit karena Bapak Imran tidak ada di tempat. Setelah menunggu kemudian Bapak Imran datang dan langsung melakukan

wawancara. Bapak Imran menjelaskan tugas UPT pariwisata bawean sebagai kepanjangan tangan dari Dinas pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gresik terkait pengembangan pariwisata di Pulau Bawean dan juga beliau menjelaskan keadaan wisata yang ada di Pulau Bawean dan juga memberikan buku tentang wisata di Pulau Bawean. Setelah dari kantor UPT pariwisata bawean peneliti langsung menuju ke kantor Desa Daun untuk menemui Bapak Abdul Aziz selaku Kepala Desa Daun. Wawancara dengan Bapak Abdul Aziz dilakukan secara cepat karena terburu waktu sholat Jum'at, tetapi sudah mendapatkan informasi yang cukup. Sore harinya peneliti pergi ke wisata Mangrove untuk menemui Bapak Subhan selaku ketua Pokmas Hijau Daun selaku pengelola tempat Wisata Mangrove yang ada di Desa Daun. Dan juga melakukan wawancara dengan Bapak Imam selaku penjaga tiket wisata Mangrove Desa Daun.

- c. Keesokan harinya peneliti mendatangi tempat-tempat wisata yang ada di Pulau Bawean yaitu , Pulau Gili Noko, dan Pantai Mombhul untuk melakukan wawancara dengan pengelola. Pertama peneliti melakukan wawancara dengan bapak Badrussalam selaku pemilik perahu penyebarangan ke Pulau Gili Noko, wawancara dilakukan diatas perahu yang sedang melaju menuju Pulau Gili Noko ditemani semilir angin yang menyejukan di tengah teriknya matahari Pulau Bawean. setelah sampai di Pulau Gili Noko peneliti langsung menemui Bapak Saidi selaku Ketua Pokmas Desa Sidogedungbatu yang kebetulan sedang berada di warung miliknya. Wawancara dilakukan di warung milik bapak Saidi. Setelah dari Pulau Gili Noko peneliti menuju ke Pantai Mombhul, disana peneliti mewancarai Bapak Ridwan selaku pengelola dan penjaga tiket Pantai Mombhul dan juga mewancarai Ibu Qurrotul Aini selaku pemilik warung yang ada di Pantai Mombhul. Selain itu juga

peneliti melakukan wawancara dengan bapak Rusdi selaku pemilik penginapan, mas Heri selaku karyawan penginapan, Bapak Ramli selaku pemilik penyewaan sepeda motor, Ibu Siti pedagang kaki lima, Mas Agus ojek pelabuhan, Napak Aminullah potter pelabuhan.

2. Observasi

Observasi atau kegiatan pengamatan, meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indra. Jadi mengobservasi dapat dilakukan melalui penglihatan, peraba, dan pengecap. Observasi dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Dalam konteks penelitian kualitatif, observasi tidak untuk menguji kebenaran tetapi untuk mengetahui kebenaran yang berhubungan dengan topik penelitian. Tujuan observasi adalah untuk memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial dan memperoleh pandangan secara holistik (Bungin dalam Satori dan Komariah 2010:105). Oleh karena itu peneliti haruslah cermat dalam membaca situasi sosial yang terjadi dalam lapangan.

Observasi yang dilakukan oleh peneliti pertama dengan melihat keadaan yang ada di Pulau Bawean, seperti mengamati penginapan atau *homestay* yang tersebar di Pulau Bawean dan terbukti banyak sekali penginapan yang tersedia untuk wisatawan di Pulau Bawean. kemudian juga mengamati beberapa tempat wisata yang ada di Pulau Bawean seperti keberadaan warung, pedagang kaki lima, penyewaan perahu, penyewaan alat snorkling dan semua dikelola oleh masyarakat sekitar Pulau Bawean.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang dilakukan oleh peneliti dengan menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, foto notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya. Menurut Bogdan dalam Satori dan Komariah (2010:153) berkenaan dengan dokumentasi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Dokumen pribadi dan buku harian

Dokumen pribadi merupakan catatan atau karangan seseorang mengenai perasaan pribadi, tindakan pengalaman dan kepercayaannya.

b. Surat pribadi

Surat pribadi berguna untuk menyatakan perasaan antara seseorang dengan orang yang lain.

c. Autobiografi

Autobiografi merupakan sebuah tulisan yang dibuat untuk menceritakan kisah seseorang dengan tujuan tertentu.

d. Dokumen resmi

Dokumen resmi biasanya terdiri dari sebuah organisasi yang berasal dari internal dan eksternal organisasi.

e. Fotografi

Foto dapat memberikan informasi yang sangat penting apabila peneliti dapat mengamati foto tersebut dengan seksama.

f. Data statistik dan data kuantitatif lain

Data statistik dapat memberikan informasi deskriptif yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data kuantitatif berupa data statistik berguna untuk kepentingan penelitian.

Dokumentasi yang digunakan untuk penelitian ini meliputi dokumen resmi, fotografi, dan data kuantitatif sebagai berikut:

1. Pariwisata Indonesia oleh Badan Pusat Statistik
2. Jumlah kunjungan wisatawan ke Indonesia dokumen Badan Pusat Statistik.
3. Jumlah Kunjungan wisatawan ke Jawa Timur dokumen Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur.

4. Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Kabupaten Gresik dan Pulau Bawean dokumen Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gresik.
5. Gresik dalam angka 2019.
6. Sangkapura dalam angka 2018.
7. Profil Wisata Pulau Bawean.

I.7.5 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif (Moleong, 2007:320).

Dan pada penelitian ini teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi. Menurut Lexy J. Moleong (2012:330) triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dengan sumber dan triangulasi metode. Menurut Patton dalam (Moleong, 2012:330) triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Sedangkan triangulasi dengan metode menurut Patton dalam (Moleong, 2012:330) terdapat dua strategi, yaitu 1. Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data, 2. Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

Dengan teknik triangulasi metode peneliti mengecek hasil penelitian dengan teknik pengumpulan data yang berbeda yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi, sehingga derajat kepercayaan data menjadi valid. Misalnya, untuk data tentang partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Pulau Bawean, ketika dilakukan wawancara jawaban informan masyarakat yang terlibat dalam pengembangan pariwisata di Pulau Bawean baik sebagai penyedia layanan wisata seperti penginapan, penyewaan sepeda motor dan mobil, penyewaan perahu, baik sebagai pengelola tempat wisata. Ketika dilakukan observasi ternyata

memang benar bahwa masyarakat turut terlibat dalam pengembangan pariwisata di Pulau Bawean. Terkait data tentang manfaat apa yang diperoleh dan siapa saja yang mendapat manfaat dari pengembangan pariwisata di Pulau Bawean menurut jawaban informan ketika wawancara dari Pemerintah Kabupaten Gresik mendapat manfaat yaitu dengan adanya pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan juga semakin dikenal luasnya wisata yang ada di Kabupaten Gresik terutama Pulau Bawean. Masyarakat juga memperoleh manfaat yaitu dengan pendapatan yang meningkat. Hal tersebut sama dengan hasil observasi yaitu wisata Pulau Bawean semakin dikenal luas dengan bertambahnya jumlah kunjungan wisata setiap tahunnya dan juga ada event internasional yang di selenggarakan di Pulau Bawean yaitu Sail to Indonesia in Bawean pada tahun 2018 dan 2019. Untuk upaya mewujudkan pariwisata yang berbasis ekologi semua pihak yang terlibat dalam pengembangan pariwisata telah melakukan upaya yang maksimal untuk menjaga kelestarian alam Pulau Bawean. Gerakan Jumat bersih yang dilakukan masyarakat Pulau Bawean salah satu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan pariwisata yang berbasis ekologi. Selain itu dalam penelitian ini juga menggunakan teknik triangulasi sumber yang mana peneliti membandingkan hasil wawancara yang didapatkan dari masing-masing sumber atau informan penelitian sebagai pembandingan untuk mengecek kebenaran informasi yang diperoleh.

I.7.6 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan kata-kata dan bukan rangkaian angka. Data bisa saja dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dll dan biasanya diproses dulu baru bisa digunakan. Tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks, dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu analisis.

Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang menurut Miles dan Hubberman dalam (Sugiyono, 2007:204) yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan. Berikut langkah-langkahnya.

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan penyederhanaan yang dilakukan melalui seleksi, pemfokusan dan keabsahan data mentah menjadi informasi yang bermakna, sehingga memudahkan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini reduksi data dilakukan untuk membuang data hasil wawancara yang kurang relevan misalnya hasil wawancara dengan masyarakat yang mana ketika dilakukan wawancara seringkali masyarakat keluar dari topik yang dibicarakan contohnya membicarakan keluarga mereka dan membicarakan hal lain yang tidak ada hubungannya dengan topik. Hal-hal yang tidak sesuai dengan fokus penelitian telah dibuang oleh peneliti, sehingga semua kutipan yang ada dalam bab tiga telah sesuai dengan topik permasalahan.

b. Penyajian data

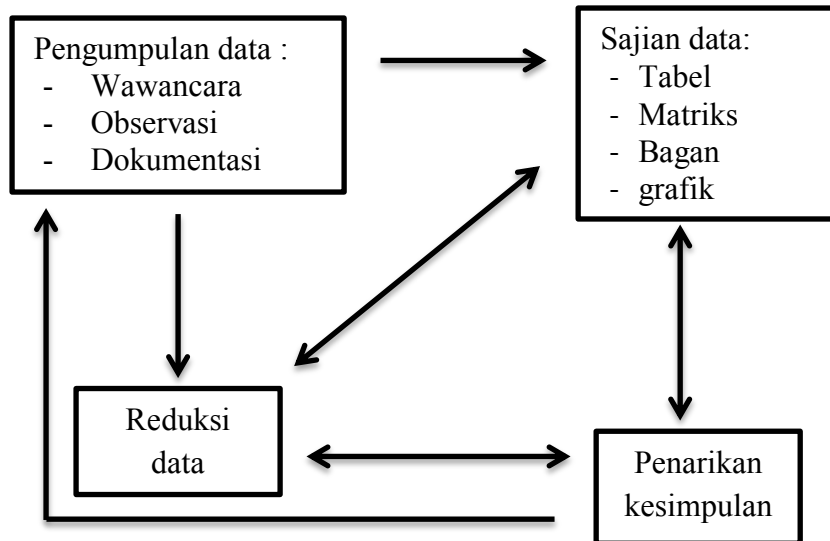
Penyajian data yang sering digunakan pada data kualitatif adalah bentuk naratif. Penyajian-penyajian data berupa sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis dan mudah. Dalam penelitian ini penyajian data juga dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, matriks, dan bagan. Penyajian data dilakukan dengan mentransformasikan informasi yang kompleks menjadi bentuk yang mudah dipahami dan lebih sederhana. Dalam hal ini peneliti telah mengolah hasil wawancara menjadi bentuk tabel-tabel yang sederhana agar mempermudah untuk memahami isi dari hasil wawancara tersebut.

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data yang dilakukan melihat hasil dari reduksi data tetap mengacu pada rumusan masalah secara tujuan yang hendak dicapai. Data yang telah disusun dibandingkan antara satu dengan yang lain untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu pembangunan pariwisata inklusif di Pulau Bawean sudah berjalan cukup baik. Partisipasi masyarakat sangat besar dalam pengembangan pariwisata di Pulau Bawean. Manfaat yang diperoleh dari pengembangan pariwisata di Pulau Bawean juga dapat dirasakan oleh semua pihak baik dari Pemda Kabupaten Gresik maupun dari masyarakat

Pulau Bawean Sendiri. Dan untuk mewujudkan wisata yang berbasis ekologi semua pihak yang terlibat dalam pengembangan pariwisata di Pulau Bawean telah melakukan langkah-langkah untuk menjaga kelestarian alam yang ada di Pulau Bawean. Untuk kesimpulan yang lebih jelas lagi disajikan pada bab empat.

Gambar I.5
Teknik Analisis Data



Sumber: Miles dan Hubberman (Sugiyono, 2007: 333-345)

I.7.7 Rincian Data Yang Diperoleh

Selama proses penelitian, peneliti telah melakukan pengumpulan data yang bertujuan untuk menjawab fokus permasalahan penelitian secara empirik. Data yang dikumpulkan berhubungan dengan permasalahan penelitian ini, yaitu pengembangan inklusif pariwisata di Pulau Bawean. Data dan informasi pendukung yang diperoleh kemudian dianalisis dan diinterpretasikan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Sebelum peneliti melakukan penelitian di lapangan, peneliti telah merencanakan data apa saja yang akan dicari untuk mendukung penelitian ini. Namun tidak semua yang direncanakan dapat terealisasi setelah melakukan penelitian di lapangan. Berikut ini tabel rencana dan realisasi data yang dikumpulkan dalam penelitian ini:

Tabel I.8
Rincian Data Yang Diperoleh Selama Penelitian

Jenis Data	Rencana	Realisasi	Keterangan
Data jumlah kunjungan wisatawan ke Indonesia	✓	✓	Data jumlah kunjungan wisatawan ke Indonesia Badan Pusat Statistik.
Data jumlah kunjungan wisatawan ke Jawa Timur	✓	✓	Data jumlah kunjungan wisatawan ke Jawa Timur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur.
Data jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Gresik	✓	✓	Data jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Gresik Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gresik.
Data jumlah Kunjungan wisatawan ke Pulau Bawean	✓	✓	Data jumlah Kunjungan wisatawan ke Pulau Bawean Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Gresik.
Data Jumlah penginapan di Pulau Bawean	✓	✓	Data Jumlah penginapan di Pulau Bawean Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gresik.
Data jumlah penyewaan mobil dan sepeda motor	✓	✓	Data jumlah penyewaan mobil dan sepeda motor diperoleh dari buku panduan wisata Pulau Bawean.
Data jumlah Kelompok Masyarakat (POKMAS) di Pulau Bawean	✓		Data jumlah Kelompok Masyarakat (POKMAS) di Pulau Bawean tidak berhasil diperoleh oleh peneliti.
Data jumlah pengerajin kerajinan anyaman pandan di Pulau Bawean	✓	✓	Data jumlah pengerajin kerajinan anyaman pandan di Pulau Bawean diperoleh dari website baweantourism
Jadwal penerbangan ke Pulau Bawean	✓	✓	Jadwal penerbangan ke Pulau Bawean diperoleh dari buku panduan wisata Pulau Bawean
Jadwal penyebarangan ke Pulau Bawean	✓	✓	Jadwal penyebarangan ke Pulau Bawean diperoleh dari buku panduan wisata Pulau Bawean.